



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 (21 Januari – 9 Februari 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI II	2
A. FUNGSI LEGISLASI	2
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI III	12
A. FUNGSI LEGISLASI	12
B. FUNGSI ANGGARAN	12
C. FUNGSI PENGAWASAN	12
KOMISI IV	18
A. FUNGSI LEGISLASI	18
B. FUNGSI ANGGARAN	18
C. FUNGSI PENGAWASAN	18

KOMISI V	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	22
KOMISI VI	25
A. FUNGSI LEGISLASI	25
B. FUNGSI ANGGARAN	27
C. FUNGSI PENGAWASAN	27
KOMISI VII	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	31
C. FUNGSI PENGAWASAN	31
KOMISI VIII	35
A. FUNGSI LEGISLASI	35
B. FUNGSI ANGGARAN	35
C. FUNGSI PENGAWASAN	51
KOMISI IX	55
A. FUNGSI LEGISLASI	55

B. FUNGSI ANGGARAN	55
C. FUNGSI PENGAWASAN	56
KOMISI X	60
A. FUNGSI LEGISLASI	60
B. FUNGSI ANGGARAN	60
C. FUNGSI PENGAWASAN	60
KOMISI XI	72
A. FUNGSI LEGISLASI	72
B. FUNGSI ANGGARAN	72
C. FUNGSI PENGAWASAN	72
KOMISI XII	80
A. FUNGSI LEGISLASI	80
B. FUNGSI ANGGARAN	80
C. FUNGSI PENGAWASAN	80
KOMISI XIII	82
A. FUNGSI LEGISLASI	82
B. FUNGSI ANGGARAN	82
C. FUNGSI PENGAWASAN	82

BADAN LEGISLASI 90

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN 96

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 98

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA 103

BADAN ASPIRASI MASYARAKAT 107

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Rapat intern dalam rangka penyusunan RUU.	Pemaparan Tim Asistensi Setjen DPR RI	--

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BIN	Timwas	Pelantikan seorang Timwas Intelijen Negara di DPR RI.	
2.	Kemkomdigi	Panja Pengawasan Judi Online	RDP dengan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi dan Deputi Bidang operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN.	
3.	Kemenlu	<i>Courtesy Call</i> 30 Januari 2025	Menerima Kunjungan Kehormatan Delegasi Tunisia .	
4.	Kemkomdigi	Raker Komisi I DPR RI	Implikasi Perpres Nomor 174 Tahun 2024 terhadap Pasal 20 UU Nomor 62 Tahun 2024 dan Pasal 18 PMK Nomor 90 Tahun 2024.	
5.	Kemhan	Raker Komisi I DPR RI	Persetujuan penerimaan Hibah Alpahankam dari Luar Negeri.	
6.	Bakamla	Kunjungan Kerja Zona Tengah dan Zona Timur	Mewujudkan Sistem Keamanan Laut yang Komprehensif, Berkelanjutan, Adaptif, Responsif, dan Inklusif.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	a. Kementerian Dalam Negeri b. KPU c. Bawaslu d. DKPP	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, dengan agenda membahas pembahasan pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota hasil pemilihan	Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI), menyetujui: 1. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		serentak Tahun 2024, hari Rabu, 22 Januari 2024.	<p>Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>	
2.	<p>a. Kementerian ATR/BPN RI b. DPP Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (DPP LEMTARI) c. Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI)</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen</p>	<p>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan dan memahami pengaduan masyarakat dari Lembaga tinggi Masyarakat Adat Indonesia (DPP Lemtari) dan MKMTI (Masyarakat Korban Mafia Tanah) yang telah menyampaikan aspirasi berbagai masalah pertanahan antara lain:</p> <p>a. Terdapat perkebunan sawit di Provinsi Riau yang belum memiliki HGU b. Tumpang tindih sertifikat c. Praktik Mafia tanah di berbagai daerah</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Staff Khusus Menteri ATR/BPN, DPP Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (DPP LEMTARI), Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI), Kanwil BPN Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kanwil BPN Provinsi RIAU, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kanwil BPN Sumatera Utara dengan agenda mendengar pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan, hari Kamis, 23 Januari 2024.</p>	<p>d. Sengketa lahan yang masuk dalam kawasan hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menindaklanjuti pengaduan permasalahan yang disampaikan LEMTARI dan MKMTI. 3. Komisi II DPR RI meminta LEMTARI dan MKMTI melengkapi dokumen disertai bukti permasalahan agar disampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk selanjutnya dibahas dalam tim bersama antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN. 4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pendataan mengenai permasalahan tumpang tindih sertifikat ataupun lahan sawit yang belum melengkapi izin serta memberikan target kepada semua perusahaan sawit yang belum memiliki HGU untuk segera melakukan pendaftaran izin HGU maksimal 6 (enam) bulan sejak RDP ini. 5. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN membuat dashboard report mengenai mekanisme penyelesaian laporan pengaduan permasalahan pertanahan yang jelas, mudah, terukur, dan transparan serta menggunakan teknologi informasi yg terbuka agar masyarakat dapat memastikan laporan pengaduan ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN dan dapat dievaluasi Anggota komisi II DPR RI per 2 (dua) bulan. 	
3.	Kementerian ATR/BPN RI	a. Pelaksanaan undang-undang;	1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) atas capaian kinerja dan realisasi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri ATR/BPN terkait evaluasi kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2024, Program Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2025, dll, pada hari Kamis, 30 Januari 2025.</p>	<p>anggaran tahun 2024 sebesar Rp7.861.137.242.568,- (<i>tujuh triliun delapan ratus enam puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah</i>) atau sebesar 99,04% dari pagu alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 sebesar Rp7.937.040.305.000,- (<i>tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk segera menerbitkan HGU terhadap 150 badan hukum yang sudah memiliki IUP dan sudah mengurus HGU paling lambat 3 Desember 2025. 3. Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN RI untuk segera menindak tegas 194 badan hukum yang memiliki IUP namun belum mengurus HGU melalui Satgas Kelapa Sawit dengan alas hukum dan kewenangan yang kuat agar tidak terjadi problematika hukum di kemudian hari. 4. Komisi II DPR RI mendesak Menteri ATR/BPN RI segera melakukan audit investigasi lengkap secara terbuka terhadap seluruh SHGB dan SHM yang diterbitkan di area/atas laut, serta membatalkan dan/atau mencabut SHGB dan SHM yang dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Komisi II DPR RI juga meminta agar seluruh pihak terkait yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ilegal di ruang laut ditindak tegas dan diproses secara hukum. 5. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.</p> <p>6. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI untuk meningkatkan kinerja penyelesaian konflik agraria dan layanan pertanahan melalui tim kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN yang dilakukan secara terbuka dan terukur, serta status penyelesaiannya dapat diakses publik melalui website Kementerian ATR/BPN secara <i>real-time</i>.</p> <p>7. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI untuk segera mengusulkan revisi sejumlah UU sektor Pertanahan dan Tata Ruang ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut di Komisi II DPR RI. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan, seperti prosentase luasan lahan plasma, penegakan hukum sektor pertanahan dan tata ruang, serta peningkatan pendapatan negara dari sektor pertanahan dan tata ruang.</p>	
4.	<p>a. Kementerian Dalam Negeri RI b. Badan Nasional Pengelola Perbatasan</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p>	<p>1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.021.069.637.329,- (<i>lima triliun dua puluh satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.205.771.827.000,- (<i>lima triliun dua ratus lima miliar tujuh</i></p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait Evaluasi Kinerja Kementerian Dalam Negeri dan BNPP Tahun 2024, Program Kerja Kementerian Dalam Negeri dan BNPP Tahun 2025 dan Pandangan Menteri Dalam Negeri terhadap rencana penataan sistem politik dan pemilu di Indonesia, hari Senin, 3 Februari 2025.</p>	<p><i>ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)</i> atau sebesar 96,45%.</p> <p>2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp231.636.430.603,- (<i>dua ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah</i>) dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp236.349.314.000,- (<i>dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah</i>) atau sebesar 98,01%.</p> <p>3. Komisi II DPR RI menerima hasil tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga terdapat efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025 pada:</p> <p>a. Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.038.635.518.000,- (<i>dua triliun tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah</i>) atau efisiensi sebesar 57,46% dari total pagu alokasi anggaran Kemendagri Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp4.792.328.518.000,- (<i>empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah</i>).</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Pagu Anggaran BNPP Tahun 2025 menjadi sebesar Rp150.800.000.000,- (<i>seratus lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah</i>) atau efisiensi sebesar 56,4 % dari total pagu alokasi anggaran BNPP Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp267.135.531.000,-. (<i>dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah</i>).</p> <p>4. Komisi II DPR RI menerima hasil tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sehingga Alokasi Anggaran Kemendagri Tahun 2025 menjadi sebesar Rp2.038.635.518.000,- (<i>Dua Triliun Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah</i>) dari total Pagu sebelumnya sebesar Rp4.792.328.518.000,- (<i>Empat Triliun Tujuh Ratus Sembiliah Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah</i>), atau efisiensi 57,46% dan Alokasi Anggaran BNPP Tahun 2025 sebesar Rp150.800.000.000,- (<i>Seratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah</i>) dari total Pagu sebelumnya sebesar Rp267.135.531.000,-. (<i>Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah</i>) atau efisiensi sebesar 56,4 %.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri mendorong program Transformasi Digital dan Administrasi Kependudukan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan digital di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) yang membuat implementasi digitalisasi pemerintahan (e-gov) berjalan merata. Sehingga Kemendagri perlu meningkatkan kapasitas aparatur SDM pemerintahan di berbagai daerah termasuk daerah 3T agar mereka mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal.</p> <p>6. Komisi II DPR RI meminta Kemendagri untuk memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan yang disertai dengan memperkuat kapasitas SDM dan ekonomi lokal sehingga program BNPP akan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.</p> <p>7. Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada 4 (empat) Provinsi baru daerah hasil pemekaran di Tanah Papua mulai dari pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan, pengisian SDM ASN, serah terima aset daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga proses penganggaran sampai terbentuknya Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	
5.	<p>a. Kementerian Dalam Negeri RI b. KPU RI c. Bawaslu RI</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p>	<p>Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	d. DKPP RI	c. Kebijakan pemerintah. Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu, tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Nasional Serentak Tahun 2024, hari Senin, 3 Februari 2025.	(BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui: 1. Pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan berdasarkan hasil Putusan/Ketetapan Dismissal MK RI serta telah ditetapkan oleh KPUD dan sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI akan dilaksanakan Pelantikan Serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara, kecuali bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kepala daerah di Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum tetap, dengan mempertimbangkan prinsip pelantikan secepatnya dan prinsip keserentakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden. Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Jadwal dan Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>4. Terhadap agenda Evaluasi Pemilihan Nasional serentak tahun 2024, akan diadakan pendalaman lebih lanjut dengan menyesuaikan jadwal agenda Komisi II DPR RI berikutnya.</p>	
6.	<p>a. Pemerintah Daerah b. Kementerian PANRB c. BKN</p>	<p>a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.</p> <p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahap I Tahun 2024, ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 5 – 7 Februari 2025.</p>	<p>Terkait evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahap I Tahun 2024. Pertemuan dengan Pj. Gubernur, Kepala Kantor Regional BKN, BKD, wakil dari Kementerian PAN&RB, dan wakil dari BKN RI.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none">Sdri. Yunita, Sdri. Anita & Sdri. Sri serta Kuasa HukumnyaSdri. Dian Sasmita (Komisioner KPAI)Sdri. Rieke Diah Pitaloka	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025, membahas kasus anak di Tasikmalaya.	<p>Komisi III DPR RI menerima pengaduan masyarakat dari Ibu Yulida terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan Nomor Perkara No.1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tsm. di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dengan ini Komisi III DPR RI memberikan rekomendasi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Komisi III DPR RI meminta Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Sdr. Dani Wijayanto, Fajar Maulana, Rajawali Sakti, dan Rava Raditya Putra sampai keluar keputusan inkracht.Komisi III DPR RI mendorong digunakannya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus ini sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Komisi III DPR RI meminta Kabid Propam Polda Jawa Barat dan Dirreskrim Polda Jawa Barat agar mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel serta mengungkap seluruh pelaku yang terlibat.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi III DPR RI meminta Polres Tasikmalaya Kota untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga dari Sdr. Dani Wijayanto, Fajar Maulana, Rajawali Sakti, dan Rava Raditya Putra.</p> <p>5. Komisi III DPR RI mendukung penuh target Kapolri untuk mengembangkan pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) hingga ke tingkat Polda dan Polres agar seluruh kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditangani secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
2.	<p>1. Kepala BNN RI 2. Sekretaris Utama BNN RI 3. Inspektorat Utama BNN RI 4. Para Deputi dan Para Kepala Badan di lingkungan BNN RI 5. Para Kepala BNNP seluruh Indonesia.</p>	<p>Raker Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, dengan agenda :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja BNN tahun 2024. 2. Rencana Strategis BNN 2024-2029. 	<p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung Rencana Kerja Strategis BNN RI tahun 2025 dalam rangka mewujudkan misi "memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba" dalam Asta Cita, serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. 2. Komisi III DPR RI mendukung BNN RI untuk mengoptimalkan anggaran tahun 2025 di seluruh jajaran, dengan memprioritaskan BNNP yang membutuhkan dukungan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah, peningkatan layanan rehabilitasi, penguatan kelembagaan, sinergi antar lembaga, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. 3. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN RI agar lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dengan melakukan koordinasi dan sinergitas antar lembaga/instansi terkait, termasuk dalam mendorong 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>optimalisasi penyitaan aset guna memutus mata rantai TPPU yang berasal dari kejahatan narkoba.</p> <p>4. Komisi III DPR RI mendukung akselerasi penegakan hukum yang berkualitas untuk mengoptimalkan program pemberantasan narkoba dan menutup segala akses peredaran gelap narkoba di Indonesia, baik oleh jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional.</p> <p>5. Komisi III DPR RI meminta Kepala BNN RI untuk mengoptimalkan Program Tim Asesmen Terpadu (TAT), serta penyempurnaan regulasi dan implementasi Program Rehabilitasi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.</p>	
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Propam Polda Jawa Barat 2. Direskrimum Polda Jawa Barat 3. Kapolres Tasikmalaya Kota 4. Para orang tua anak berhadapan dengan hukum (ABH dan Kuasa Hukumnya, didampingi Rieke Diah Pitaloka (Anggota DPR RI) 5. Kuasa Hukum Keluarga Alm. Rahmat Vaisandri, didampingi Andre Rosiade (Anggota DPR RI). 	<p>RDP dan RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut RDPU tanggal 21 Januari 2025 mengenai kasus penangkapan anak di Tasikmalaya. 2. Mendengarkan aspirasi terkait kasus pembunuhan alm. Rahmat Vaisandri 	<p>Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan dari Kabid Propam dan Dirreskrimum Polda Jawa Barat, Kapolres Tasikmalaya Kota, serta perwakilan orang tua anak dan penasihat hukum terkait kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan Putusan No.1.Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tsm dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta menerima pengaduan masyarakat dari keluarga Alm. Rahmat Vaisandri.</p> <p>Dengan ini Komisi III DPR RI memberikan kesimpulan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung agar upaya hukum banding yang dilakukan Penasihat Hukum Anak Dani Wijayanto, Anak Fajar Maulana, Anak Rajawali Sakti, dan Anak Rava Raditya Putra agar ditangani secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. 2. Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pemeriksa perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta Polri dan seluruh Aparat Penegak Hukum, termasuk Kejaksaan dan Pengadilan, untuk selalu berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam setiap penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk memenuhi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Komisi III DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan dugaan pembunuhan terhadap Sdr. Rahmat Vaisandri dengan Laporan Polisi Nomor LP/A/13/X/2024/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEKPASAREBO/PO LRESMETROJAKTIM/ POLDAMETROJAYA secara transparan dan berkepastian hukum dengan mengedepankan metode <i>scientific crime investigation</i> secara komprehensif, serta menindak tegas para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>5. Komisi III DPR RI meminta Kabid Propam Polda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Timur untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum Brimob yang diduga menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus kematian Sdr. Alm. Rahmat Vaisandri.</p>	
4.	Anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sumber Daya Alam	Rapat Intern Panja Pengawasan Penegakan Hukum Sumber Daya Alam tanggal 3 Februari 2025	Rapat Panja Pengawasan Penegakan Hukum sumber daya alam dilakukan secara tertutup.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Mafia Tanah	Rapat Intern Panja Pengawasan Penegakan Hukum Mafia Tanah tanggal 3 Februari 2025	Rapat Panja Pengawasan Penegakan Hukum mafia tanah dilakukan secara tertutup.	
6.	Anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Narkotika	Rapat Intern Panja Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Narkotika tanggal 4 Februari 2025	Rapat Panja Pengawasan Penegakan Hukum bidang narkotika dilakukan secara tertutup.	
7.	Anggota Panja Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Siber	Rapat Intern Panja Pengawasan Penegakan Hukum Bidang Siber tanggal 4 Februari 2025	Rapat Panja Pengawasan Penegakan Hukum bidang siber dilakukan secara tertutup.	
8.	1. Karo SDM Polda Jawa Barat 2. Kepala SPN Cisarua Polda Jawa Barat 3. Sdri. Veronica Putri Amalia (selaku orang tua dari Valyano Boni Raphael, siswa SPN Polda Jabar yang diberhentikan)	RDP dan RDPU Komisi III DPR RI tanggal 6 Februari 2025, membahas kasus pemberhentian siswa SPN Polda Jabar a.n. Valyano Boni Raphael.	Kesimpulan: 1. Komisi III DPR RI meminta Kapolda Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap pemberhentian Sdr. Valyano Boni Raphael melalui SK Kapolda Nomor: Kep/1605/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 secara transparan dan berkeadilan. 2. Komisi III DPR RI mendukung Kapolda Jawa Barat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jabar. 3. Komisi III DPR RI meminta Kapolri menugaskan Kalemndiklat Polri dan Kadiv Propam Mabes Polri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelanggaran kode etik, serta ketidaksesuaian prosedur pendidikan dan pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat dan seluruh Indonesia agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, profesionalisme, dan akuntabilitas.	
9.	1. Kapolda Aceh 2. Gubernur Akademi Kepolisian	RDP Komisi III DPR RI tanggal 6 Februari 2025,	Kesimpulan:	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		membahas tindak lanjut atas kasus pelanggaran yang dilakukan Ipda. YF.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III DPR RI mendukung Kabid Propam Polda Aceh untuk segera meningkatkan hasil gelar penyelidikan paminan dan gelar perkara terhadap Ipda YF ke Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian secara transparan dan akuntabel. 2. Komisi III DPR RI meminta Kadiv Propam Mabes Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Ipda YF secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk menugaskan Kepala Lemdiklat Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di Akademi Kepolisian agar senantiasa menjunjung etika dan integritas, serta nilai moral dan hukum yang tinggi. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan dan para kapoksi Komisi IV	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada 21 Januari 2025.	Membicarakan Rencana Kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 dan lain-lain	
2.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV	Rapat Internal dilaksanakan pada 21 Januari 2025.	1. Menyusun Program Kerja Komisi IV DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025; dan 2. Lain-lain.	
3.	1. Pj. Gubernur; 2. Pj. Bupati Tangerang; 3. Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Eselon I Kementerian Kehutanan; 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten; 6. Dinas Lingkungan Hidup dan	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Banten terkait Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan pada 22 Januari 2025.	Peninjaun dan diskusi ke lokasi rencana alih fungsi kawasan hutan lindung yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang	-

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<p>Kehutanan Provinsi Banten; 7. Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang; 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang; dan 9. Direksi Perum Perhutani</p>			
4.	<p>1. Pj. Gubernur Banten; 2. Pj. Bupati Tangerang; 3. Dirjen PSDKP, Kementerian KP; 4. Dirjen PKRL, Kementerian KP; 5. Dirjen PDAS-RH, Kementerian Kehutanan; 6. Kepala Dinas KP Provinsi Banten; 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten; 8. Kepala Ombudsman Provinsi Banten; dan 9. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten</p>	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Banten terkait Pagar Laut dilaksanakan pada 22 Januari 2025.</p>	<p>Meninjau Pagar Laut dan Berdiskusi terkait permasalahan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.</p>	
5.	<p>1. Pj. Gubernur Jawa Barat 2. Bupati Kabupaten Bekasi 3. Dirjen Pengawasan Sumber Daya KP, KKP</p>	<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada 22 Januari 2025.</p>	<p>Peninjauan dan diskusi mengenai pagar laut di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	4. Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP 5. Dirjen Perikanan Tangkap, KKP 6. Dirjen Pengelolaan DAS, Kemenhut 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jabar 8. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jabar 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Rehabilitasi Hutan Prov. Jabar 10. Kepala Ombudsman Prov. Jawa Barat 11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 12. Kepala Dinas Perikanan Kab. Bekasi 13. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Satpel PPI Pal Jaya 14. Nelayan, LSM dan Pemerhati Pesisir dan Laut			
6.	Menteri Kelautan dan Perikanan	Rapat Kerja dilaksanakan pada 23 Januari 2025.	1. Pemagaran Laut; dan 2. Isu-isu aktual lainnya.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Menteri Kehutanan Menghadirkan: 1. Perum Perhutani; 2. Inhutani I; dan 3. Inhutani V	Rapat Kerja dilaksanakan pada 23 Januari 2025.	1. Program kerja dan Anggaran Tahun 2025; 2. Alih Fungsi Lahan; dan 3. Isu-isu aktual lainnya	
8.	1. Kepala Badan Pangan Nasional 2. Direktur Utama Perum BULOG; 3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 4. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia(RNI)/holding pangan/ID FOOD	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada 4 Februari 2025.	1. HPP Gabah; 2. Ketersediaan pangan menjelang Ramadhan; 3. Ketersediaan dan distribusi pupuk; dan 4. Isu-isu aktual lainnya.	
9.	1. DPRD Kabupaten Lampung Utara; 2. Persatuan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung	Audiensi dilaksanakan pada 5 Februari 2025.	Stabilitas harga singkong	
10.	Panitia Khusus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung	Audiensi dilaksanakan pada 5 Februari 2025.	Mendengarkan Aspirasi Petani Singkong Se- Provinsi Lampung	
11.	PT. Putra Perkasa Genetika	Audiensi dilaksanakan pada 5 Februari 2025.	Penyampaian informasi terkait kemampuan Nasional siapkan dukungan terhadap kedaulatan pangan, khususnya protein hewani berbasis unggas.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Bina Marga & BPJT, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi)2. Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Darat, Laut Dan Udara, Perkeretaapian), Angkasa Pura, Integrasi Aviasi Solusi, PELINDO, PELNI, KAI, ASDP dan Stakeholders terkait infrastruktur dan Transportasi3. BMKG4. BASARNAS5. Kakorlantas Polri6. KNKT	Raker dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025.	Membahas evaluasi terhadap pelaksanaan Angkutan Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.	
2.	DPRD Pangkajene dan kepulauan	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Jumat, 24 Januari 2025	Perihal konsultasi terkait dermaga Pulau terpencil.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	DPRD Garut	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Jumat, 24 Januari 2025	Perihal konsultasi infrastruktur.	
4.	DPRD Pesisir Selatan	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Kamis, 30 Januari 2025.	Penyampaian Aspirasi Pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.	
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara 2. Pelindo 3. Jakarta <i>International Container Terminal</i> 4. Airnav 5. PT. AP Indonesia 6. PT. Angkasa Transportindo 7. Stakeholders 	Kunjungan Kerja <i>On the Spot</i> dilaksanakan pada hari Senin, 3 Februari 2025.	Kunjungan Kerja <i>On the Spot</i> ke Tanjung Priok dan Halim Perdana Kusuma dalam rangka meninjau Peti Kemas dan Sarpras serta pengelolaan Bandara.	
6.	DPRD Kota Serang	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Rabu, 5 Februari 2025.	Tugas Pokok dan Fungsi DPRD.	
7.	DPRD Prov Sumut	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Kamis, 6 Februari 2025.	Penugasan Instansi Terkait.	
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri PU 2. Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman 3. Menteri Desa Dan PDT 4. Menteri Transmigrasi 5. Kepala BMKG 	Kamis, 6 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.	Acara: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024; - Membahas Program Kerja Tahun 2025; - Lain-lain. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (BNPP/Basarnas)			
9.	DPRD PROV NTT	Audiensi dilaksanakan pada tanggal Kamis, 7 Februari 2025.	Konsultasi terkait Infrastruktur di Provinsi NTT.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025.	Mendengar masukan dari: 1. Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I (FH UI) 2. Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum. (FH UGM)	
2.		Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025.	Mendengar masukan dari: 1. Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D. (FEB-UI) 2. Dr. Yuli Indrawati, S.H.,LLM. (FH-UI) 3. Dr. Toto Pranoto (<i>Senior Consultant, Lembaga Management FEB UI</i>)	
3.		Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2025.	Pembahasan DIM RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 2. Pembentukan Timus dan Timsin Pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 	
5.		Rapat Timus dan Timsin Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2025.	Perumusan dan Sinkronisasi Draft RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	
6.		Rapat Timus dan Timsin Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2025.	Laporan Timus dan Timsin kepada Panja atas hasil perumusan dan sinkronisasi Draft RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN	Rapat Kerja Tingkat I dengan Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Sekretaris Negara RI dilaksanakan pada Tanggal 1 Februari 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Pimpinan Komisi VI 2. Laporan Panja ke Raker atas hasil pembahasan DIM RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. 3. Pembacaan Naskah RUU. 4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi. 5. Pendapat Akhir Presiden (Pemerintah). 6. Penandatanganan draft RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 7. Pengambilan Keputusan Tk. I atas pembahasan draft RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II. 	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkumpulan Pensiunan Jiwaseraya 2. Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk 	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwaseraya.</p> <p>Digabung dengan:</p>	<p>Audiensi terkait permasalahan kewajiban solvabilitas Jiwaseraya kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwaseraya (DPPK Jiwaseraya)</p> <p>(Surat PM ter tanggal 10 Oktober 2024 dan 19 November 2024).</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Kaltim (PP-PKT)	<p>Pengurus Pusat Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim (PP-PKT).</p> <p><i>(Terkait Pengaduan Masyarakat)</i></p> <p>Dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025.</p>	<p>Audiensi terkait permasalahan PP-PKT yang sebagian merupakan peserta polis korporasi anuitas Jiwasraya yang terdampak Program Restrukturisasi Polis Asuransi Jiwasraya.</p> <p>(Surat PM tertanggal 3 Januari 2025).</p>	
2.	<p>Pimpinan PT. Dani Tasha Lestari (Bpk. Rury Afriansyah dan Perwakilan U-SAFE Law Firm (Bpk. Eko Nurisman)</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pimpinan PT. Dani Tasha Lestari (Bpk. Rury Afriansyah dan Perwakilan U-SAFE Law Firm (Bpk. Eko Nurisman) dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025.</p> <p><i>(Terkait Pengaduan Masyarakat)</i></p>	<p>Audiensi terkait permasalahan PT Dani Tasha Lestari terkait pencabutan pengalokasian lahan dan perobohan bangunan akibat adanya dugaan praktik mafia lahan dan oknum di Badan Pengusahaan Batam.</p> <p>(Surat PM ter tanggal 20 November 2024 dan tanggal 27 Desember 2024 dan 31 Januari 2025).</p>	
3.	<p>1. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero) 2. Dirut PT. Pupuk Kaltim 3. Dirut PT. Asuransi Jiwa IFG. 4. Dirut PT. Jiwasraya.</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025.dengan:</p> <p>1. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero) 2. Dirut PT. Pupuk Kaltim 3. Dirut PT. Asuransi Jiwa IFG. 4. Dirut PT. Jiwasraya.</p>	<p>Tindak Lanjut Penanganan pembayaran Polis Asuransi Jiwasraya yang terkait dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim.</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/ ID Survey beserta Sub Holdingnya	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/ ID Survey beserta Sub Holdingnya dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025.	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024.2. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025.3. Lain-lain.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata RI dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Penjelasan Menteri Pariwisata RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa 2. Lain-lain	
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	Rapat Internal dilaksanakan pada hari Selasa 4 Febuari 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pembentukan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa. 2. Lain-lain.	
3.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada hari Senin 4 Februari 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Penjelasan BKD terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (<i>carryover</i>). 2. Lain-lain.	
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa	Rapat Dengar Pendapat Umum Dilaksanakan pada hari Senin 5 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, dengan Para Pakar: 1. Prof. Dr. Azril Azahari (Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia) 2. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (Pakar Hukum Perundang-	1. Meminta Pandangan dan Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa. 2. Lain-lain.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Undangan dan Administrasi Negara UI) 3. Prof. Dr. Diena Mutiara Lemy, A.Par., M.M., CHE (Dekan Fakultas <i>Hospitality &</i> <i>Pariwisata/Pakar Pariwisata</i> <i>Berkelanjutan UPH</i>) 4. Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. (Pakar Hukum Lingkungan Lingkungan UI) 5. Dr. Komara Djaja (Peneliti LPEM UI).		

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri UMKM RI	Rapat Kerja Dilaksanakan pada hari Senin 5 Februari 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Pembahasan Program Kerja dan Rencana Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025 2. Lain-lain	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pimpinan Komisi VII DPR RI	Rapat Pimpinan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Januari 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Penyusunan Program Kerja Komisi VII DPR RI. 2. Lain-lain.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Pimpinan dengan Anggota Komisi VII DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada hari Selasa 21 Januari 2025, pukul 15.00 WIB.	1. Pembahasan Program Kerja Komisi VII DPR RI 2. Lain-lain	
3.	Rapat Internal Komisi VII DPR RI	Rapat Internal dilaksanakan pada hari Rabu 22 Januari 2025, pukul 12.00 WIB.	1. Penyempurnaan Jadwal Rapat Komisi VII DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025. 2. Lain-lain	
4.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI	Rapat Dengar Pendapat Dilaksanakan pada hari Kamis 23 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pemaparan dan pembahasan perkembangan dan kebijakan industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri farmasi, industri semen, industri keramik, dan industri pengolahan bahan galian nonlogam serta industri tekstil, industri kulit, dan industri alas kaki. 2. Lain-lain.	
5.	Eselon I Kementerian Kementerian Pariwisata RI	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis 30 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pembahasan Program Kerja Eselon I Kementerian Pariwisata TA 2025. 2. Lain-lain.	
6.	1. Dirjen ILMATE 2. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis 30 Januari 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Pemaparan dan pembahasan perkembangan dan strategi peningkatan daya saing industri logam, industri mesin, industri alat transportasi dan maritim serta industri elektronika dan telematika; 2. Pemaparan dan pembahasan perkembangan dan strategi peningkatan daya saing industri	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. 3. Lain-Lain.	
7.	Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian RI	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Senin 3 Februari 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Pemaparan dan Pembahasan Perkembangan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Aneka. 2. Pemaparan dan pembahasan perkembangan dan kebijakan pembangunan SDM Industri 3. Lain-lain.	
8.	1. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Sumatera Selatan 2. Direksi PT Mariana Bahagia	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sumatera Selatan, ke PT Mariana Bahagia terkait Perkembangan industri perkapalan yang berada di dibawah koordinasi Kementerian Perindustrian dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu 6-8 Februari 2025.	Diskusi dan Peninjaun ke lokasi industri perkapalan PT Mariana Bahagia yang berada di dibawah koordinasi Kementerian Perindustrian, di Provinsi Sumatera Selatan	
9.	1. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Perindustrian 2. Direksi PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Jawa Barat ke PT. Hyundai Motor <i>Manufacturing</i> Indonesia terkait pengawasan perkembangan industri sektor manufaktur , pada PT. Hyundai Motor <i>Manufacturing</i>	Diskusi dan Peninjaun ke Lokasi PT. Hyundai Motor <i>Manufacturing</i> Indonesia, Cikarang, Bekasi, Provinsi Jawa Barat.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Indonesia dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu 6-8 Februari 2025.		
10.	1. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya 2. Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 ke Smelter Gresik, PT Freeport Indonesia, Provinsi Jawa Timur terkait kebijakan hilirisasi dapat mendorong peningkatan nilai tambah yang lebih optimal dan industri pengolahan dalam negeri lebih berdaya saing di pasar global, pada PT. Freeport Indonesia Indonesia Dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu 6-8 Februari 2025.	Diskusi dan Peninjaun ke Lokasi Smelter Gresik, PT. Freeport Indonesia, Provinsi Jawa Timur.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Menteri PPPA RI dan Ketua KPAI	Rapat Kerja dan RDPU dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025, pukul 13.41 s.d. 17.08 WIB, dengan agenda: 1. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025; 2. Isu-isu aktual.	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Rapat Dengar Pendapat bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan agenda: “Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Isu-Isu Aktual” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI mengenai efisiensi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2025 sebesar Rp.160.699.000.000,- (<i>seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah</i>) sehingga anggaran yang semula sebesar Rp.300.654.181.000,- (<i>tiga ratus miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>) menjadi Rp.139.955.181.000,- (<i>seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah</i>). 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk mengusulkan anggaran prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada Komisi VIII DPR RI paling lambat tanggal 7 Februari 2025.</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terkait penundaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2025 sebesar Rp.93.689.253.000,- yang ditujukan bagi 40 daerah penerima. Karena adanya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. SE 900.1.3/6629.A/SJ dan No. SE-1/MK.07/2024 tidak termasuk DAK Nonfisik PPA tahun 2025 sebesar Rp.132.000.000.000,- (<i>seratus tiga puluh dua miliar rupiah</i>) yang ditujukan untuk 304 daerah penerima dengan ruang lingkup kegiatan layanan bagi korban KtPA, TPPO, ABH, dan perkawinan anak; serta peningkatan kapasitas SDM layanan dan pendataan.</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI serta Ketua KPAI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memprioritaskan program sosialisasi UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. b. Meningkatkan pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Mendorong KPPPA RI dan KPAI untuk bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan anak. d. Mengintensifkan sosialisasi standar layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e. Komisi VIII DPR RI mendorong bersama KPPPA RI dan KPAI untuk melakukan rapat gabungan dengan Komisi I DPR RI, Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan pembahasan pembatasan akses anak terhadap internet dan media sosial.</p>	
2.	Menteri Agama RI	<p>Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025, pukul 17.25 s.d. 21.29 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025; 2. Isu-isu aktual. 	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, dengan agenda: “Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Agama RI mengenai efisiensi anggaran Kementerian Agama RI tahun 2025 sebesar Rp14.284.062.000.000 (<i>empat belas triliun dua ratus delapan puluh empat miliar enam puluh dua juta rupiah</i>), sehingga pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp78.552.159.164.000 (<i>tujuh puluh delapan triliun lima ratus lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah</i>) menjadi sebesar Rp64.268.097.164.000 (<i>enam puluh empat triliun dua ratus enam puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu rupiah</i>). 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program tahun 2025, termasuk satuan tiganya, sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama RI kepada Komisi VIII DPR RI paling lambat 7 Februari 2025. 3. Komisi VIII DPR RI mendukung perpanjangan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri dari <i>Saudi Fund for Development (SFD)</i>-Arab Saudi untuk tahun 2025 sebesar USD25.024.745,00 (<i>dua puluh lima juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima dolar</i> 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Amerika) atau sekitar Rp400.395.923.311,00 (<i>empat ratus miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah</i>) dengan kurs 1.00 USD sebesar Rp16.000, untuk pembangunan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilaksanakan sejak tahun 2023 dan berakhir tahun 2025.</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan saran dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghindari efisiensi anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung dengan penyediaan layanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti BOS, BOP, PIP, PPG, beasiswa, petugas haji, kebutuhan guru agama, dan lainnya. b. Dalam hal efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan program-program di Kementerian Agama RI. c. Memperhatikan pemerataan bantuan kepada rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan baik negeri maupun swasta. d. Mempercepat peningkatan status kelembagaan direktorat pesantren dari Eselon II menjadi Eselon I sebagaimana keputusan rapat-rapat Komisi VIII DPR RI terdahulu. e. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN untuk memanfaatkan secara maksimal kuota yang tersedia untuk sertifikasi tanah-tanah wakaf bagi rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> f. Berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guru-guru agama yang berada di lingkungan Kemendikdasmen agar mendapat hak-haknya. g. Mengupayakan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diwujudkan untuk murid-murid di lembaga pendidikan keagamaan. h. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI untuk mencegah lolosnya pemegang visa ziarah dan visa pekerja ke Arab Saudi menjelang pelaksanaan ibadah haji. i. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sarana-prasana di lingkungan Kementerian Agama RI, sehingga terhindar dari penyalahgunaan, penyimpangan moral dan etika. 	
3.	Kepala Badan Penyelenggara Haji	<p>Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2025, pukul 13.28 s.d. 16.06 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025; 2. Isu-isu Aktual 	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, dengan agenda: “Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 dan Isu-isu Aktual”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI mengenai efisiensi anggaran Badan Penyelenggara Haji RI tahun 2025 sebesar Rp85.900.000.000,- (<i>delapan puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah</i>). Selanjutnya berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI tanggal 5 Desember 2024, anggaran Badan Penyelenggara Haji RI sebesar Rp179.739.976.000,- (<i>seratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i>). Kemudian berdasarkan Rapat Kerja Komisi VIII 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji tanggal 4 Februari 2025, anggaran Badan Penyelenggara Haji dilaporkan sebesar Rp129.739.976.000,- (<i>seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i>).</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Haji RI untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama RI dan Kementerian Keuangan RI terhadap pelimpahan anggaran sebesar Rp50.000.000.000,- (<i>lima puluh miliar rupiah</i>), sesuai hasil kesimpulan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dari Kementerian Agama RI ke Badan Penyelenggara Haji RI pada tanggal 5 Desember 2024, sehingga anggaran Badan Penyelenggara Haji RI setelah efisiensi yaitu Rp43.839.976.000,- ditambah Rp50.000.000.000,- menjadi Rp93.839.976.000,- (<i>sembilan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah</i>).</p> <p>3. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Haji RI untuk mengusulkan anggaran prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara Haji RI kepada Komisi VIII DPR RI sebelum tanggal 7 Februari 2025.</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Haji RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan saran dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal adanya efisiensi anggaran Badan Penyelenggara Haji RI tahun 2025 tidak mengurangi kualitas</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>penyelenggaraan ibadah haji atau kinerja Badan serta pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.</p> <p>b. Mendesak Kepala Badan Penyelenggara Haji RI untuk mengoptimalkan alokasi anggaran tahun 2025 agar dapat direalisasikan secara maksimal dalam rangka mewujudkan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji, yakni sukses ritual penyelenggaraan haji, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses peradaban serta keadaban haji menuju Indonesia emas tahun 2045.</p> <p>c. Mendesak Badan Penyelenggara Haji RI untuk menyusun persiapan penyelenggaraan haji tahun 1447 H/2026 M</p>	
4.	Kepala Baznas dan Ketua BWI	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025, pukul 10.49 s.d. 13.54 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025; 2. Isu-isu aktual. 	<p>Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan agenda, “Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 dan Isu-Isu Aktual”, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian dan target kinerja tahun 2024 dan selanjutnya mendesak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Mencapai target capaian pengumpulan ZIS DSKL Nasional tahun 2025 sebesar Rp50.123.930.891.276,- (<i>lima puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah</i>). b. Menyusun rencana capaian proyeksi pengumpulan zakat nasional tahun 2025 di dalam neraca sebesar Rp13.335.447.759.280,- (<i>tiga belas triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah</i>) dan yang 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>di luar neraca sebesar Rp38.728.180.331.998,- (<i>tiga puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah</i>) sehingga total proyeksi hasil pengumpulan nasional sebesar Rp50.063.628.091.276,- (<i>lima puluh triliun enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah</i>).</p> <p>c. Memastikan pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2025, antara lain dukungan penguatan Program Layanan Kesehatan di 34 provinsi, Program BAZNAS <i>Microfinance</i>, Program Desa/Kampung Zakat, Program Santripreneur, Program Beasiswa BAZNAS, Program <i>Z-Chicken</i>, Program <i>Z-Mart</i>, Program Rumah Layak Huni, Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan <i>Stunting</i>, serta Program BAZNAS Tanggap Bencana.</p> <p>d. Memetakan langkah dan strategi untuk mengoptimalkan potensi zakat, sehingga target per tahun dapat dicapai guna mendukung program prioritas dan dapat membantu kegiatan kemanusiaan di negara lain.</p> <p>2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian dan target kinerja tahun 2024 dan selanjutnya mendesak Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk:</p> <p>a. Meningkatkan target capaian potensi ekosistem wakaf uang sebesar Rp180 triliun.</p> <p>b. Mengoptimalkan kontribusi wakaf tanah pada bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.</p> <p>c. Memastikan pelaksanaan program prioritas Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB), yang meliputi Program Wakaf Uang ASN</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, dan BUMN, Wakaf Calon Pengantin, Wakaf Dana Abadi Masjid, Wakaf Penyuluh Agama, Wakaf Jemaah Haji dan Umrah, dan Wakaf Dana Abadi Pendidikan Pesantren.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Menggerakkan wakaf tunai dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. e. Merespon dan menindaklanjuti wakaf tanah bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. <p>3. Dalam rangka meningkatkan kinerja BAZNAS dan BWI, Komisi VIII DPR RI berkomitmen memberi dukungan beberapa kebijakan, dari aspek dukungan program, kebutuhan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kelembagaan dengan melakukan perubahan pola hubungan kelembagaan yang bersifat struktural tidak lagi koordinatif, baik BAZNAS dan BWI, di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Melakukan percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. c. Mendukung rencana kebijakan pengelolaan daging hewan kurban dan <i>dam</i> bagi jemaah haji untuk disalurkan di dalam negeri yang didukung dari hasil kajian dan koordinasi dengan pihak terkait. d. Mendukung dilakukannya pembinaan, antara lain <i>Nazhir</i> tersertifikasi SKKNI Wakaf, dan penetapan BWI sebagai <i>Nazhir</i> Negara dan percepatan penyelesaian sengketa wakaf litigasi dan non litigasi. e. Mendukung dilakukannya pembinaan Amil Zakat Baznas tersertifikasi dan penetapan sebagai Amil Zakat Negara. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Komisi VIII DPR RI mendorong BAZNAS dan BWI untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 dengan memperhatikan saran dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program pemberdayaan BAZNAS dan BWI lebih diarahkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dan wakaf didukung sistem dan audit independen. c. Meningkatkan sosialisasi program prioritas BAZNAS dan BWI, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berzakat dan berwakaf. d. Meningkatkan tata kelola dengan memanfaatkan digitalisasi serta melakukan percepatan penyelesaian sengketa tanah wakaf. e. Pelaksanaan program dan kegiatan BAZNAS dan BWI yang merespon aspirasi masyarakat. f. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kemiripan program, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. 	
5.	Kepala Badan Jaminan Produk Halal	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025, pukul 14.34 s.d. 16.54 WIB, dengan agenda: 1. Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025;	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI, dengan agenda: "Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 Dan Isu-Isu Aktual", dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp233.699.000.000,- (<i>dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah</i>), sehingga pagu anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Isu-isu aktual.	<p>Halal RI tahun 2025 yang awalnya alokasi anggaran sebesar Rp436.812.997.000,- (<i>empat ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>) menjadi sebesar Rp203.113.997.000,- (<i>dua ratus tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI agar mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program tahun 2025, termasuk satuan tiganya sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI kepada Komisi VIII DPR RI paling lambat tanggal 7 Februari 2025. 3. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya menguatkan peran BPJPH sebagai pihak otoritatif penyelenggara jaminan produk halal dengan mengintegrasikan fungsi BPJPH menjadi satu atap layanan sertifikasi halal. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan saran dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan layanan sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman untuk pelaku usaha mikro dan kecil. b. Melakukan rasionalisasi target 18 juta sertifikat halal atau 35 juta produk bersertifikat halal sampai tahun 2029. c. Penguatan regulasi dan kemitraan dalam mewujudkan target sertifikasi halal. d. Mengoptimalkan digitalisasi layanan sertifikat halal dan menyediakan layanan <i>e-commerce</i> produk halal serta <i>endorsement</i> dari para <i>influencer</i>. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			e. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan sertifikasi halal disemua pelaku usaha.	
6.	Kepala Badan Pelaksana BPKH	Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 10.45 s.d. 12.59 WIB, dengan agenda: 1. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025; 2. Isu-isu aktual.	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan agenda: “Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran 2025” dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Kepala BPKH mengenai perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2025 yang telah diputuskan pada rapat tanggal 24 September 2024, dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dana Kelolaan sebesar Rp188,86 triliun. b. Pendaftaran Haji Baru (Jemaah) sejumlah 422.000 orang. c. Nilai Manfaat yang semula sebesar Rp12,89 triliun, dirubah menjadi sebesar Rp11,50 triliun. d. Program Kemaslahatan sebesar Rp240,40 miliar. e. Biaya Pengeluaran Operasional BPKH sebesar Rp426 miliar. f. Distribusi Nilai Manfaat ke Jemaah Haji Tunggu sebesar Rp4,4 triliun. 2. Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk menyampaikan rincian perubahan RKAT tahun 2025 kepada Komisi VIII DPR RI paling lambat tanggal 13 Februari 2025. 3. Komisi VIII DPR RI memahami rincian alokasi Program Kemaslahatan BPKH Tahun 2025 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Dakwah sebesar Rp48,08 miliar. b. Pelayanan Ibadah Haji sebesar Rp48,08 miliar. c. Pemberdayaan Ekonomi Umat sebesar Rp24,04 miliar. d. Sarana dan Prasarana Ibadah sebesar Rp24,04 miliar. e. Kesehatan sebesar Rp36,06 miliar. f. Sosial Keagamaan sebesar Rp48,08 miliar. 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>g. Tanggap Bencana sebesar Rp12,02 miliar.</p> <p>4. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan mengenai penurunan Biaya Operasional BPKH tahun 2025 sebesar Rp.50.000.000.000,- (<i>lima puluh miliar rupiah</i>), sehingga Biaya Opearsional yang semula dari Rp476 miliar menjadi Rp426 miliar. Selanjutnya, rincian pemanfaatan Biaya Operasional ini harus disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI.</p> <p>5. Perubahan RKAT BPKH tahun 2025 atas keputusan rapat tanggal 24 September 2024 mengenai RKAT BPKH tahun 2025 akan dibahas kembali pada rapat selanjutnya.</p> <p>6. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan rincian sumber pendapatan untuk mencapai target nilai manfaat tahun 2025, baik yang bersumber dari penempatan maupun investasi. b. Mempertimbangkan pengadaan valuta asing dengan teknik <i>hedging</i> sesuai prinsip <i>syariah</i> untuk menghindari kerugian transaksi. c. Meningkatkan porsi investasi langsung keuangan haji untuk meningkatkan capaian nilai manfaat pada tahun berjalan. d. Mengoptimalkan program kemaslahatan untuk pemberdayaan ekonomi umat sehingga berkontribusi maksimal dalam pengentasan kemiskinan. 	
7.	Kepala BNPB	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 14.28 s.d.	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda: “ Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 BNPB dan Isu-Isu Aktual ” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>16.45 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025; 2. Isu-isu aktual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan Kepala BNPB mengenai efisiensi anggaran BNPB tahun 2025 sebesar Rp620.598.000.000,- (<i>enam ratus dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah</i>) sehingga anggaran yang semula sebesar Rp1.427.574.663.000,- (<i>satu triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>) menjadi Rp806.976.663.000,- (<i>delapan ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah</i>). 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB untuk menyampaikan penetapan program dan anggaran secara terinci setelah adanya efisiensi, paling lambat pada tanggal 7 Februari 2025. 3. Komisi VIII DPR RI menyetujui melanjutkan pelaksanaan kegiatan <i>Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP)</i> atau pinjaman dari Bank Dunia yang tidak terserap di tahun 2024 agar dapat dilanjutkan di tahun 2025 yaitu sebesar Rp166.664.622.060.- (<i>seratus enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu enam puluh rupiah</i>) yang diantaranya dipergunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Pusdalops BPBD di 34 Provinsi, dan Pusdalops BPBD di 30 Kab/Kota prioritas <i>IDRIP</i>. b. Pengembangan cadangan fasilitas Pusdalops BNPB Sentul. c. Pemasangan rambu dan papan informasi. d. Sirine untuk diseminasi informasi peringatan dini gempa bumi & tsunami. 4. Komisi VIII DPR RI mendukung adanya revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang terkait dengan kebutuhan pengalokasian Dana Siap Pakai (DSP), sehingga DSP dapat digunakan tidak hanya saat status tanggap darurat saja, tetapi juga ketika status siaga darurat, transisi darurat, dan keadaan tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Komisi VIII DPR RI mendukung adanya penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah agar Belanja Tidak Terduga (BTT) Daerah yang semula hanya dapat digunakan pada fase tanggap darurat, agar juga dapat digunakan pada fase siaga darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. 6. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala BNPB untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan program upaya pencegahan bencana dalam rangka mengurangi risiko daerah terdampak bencana. b. Melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana serta mempermudah akses untuk pengajuan bantuan bencana. c. Mengakomodir berbagai persoalan kebencanaan di daerah dengan melakukan koordinasi secara intensif dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana. d. Melakukan berbagai inovasi pencegahan bencana melalui program di Kedeputusan Bidang Sistem dan Strategi. 	
8.	Menteri Sosial RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Kamis, 6 Februari 2025, pukul 19.32 s/d 22.57 WIB dengan agenda:	<p>Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI yang membahas "Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dan Isu-isu Aktual" disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Sosial RI mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.326.795.000.000,- (<i>satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh</i> 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2025; 2. Isu-isu Aktual 	<p><i>ratus sembilan puluh lima juta rupiah)</i> dari pagu anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2025 sebesar Rp. 79.588.005.512.000,- (<i>tujuh puluh sembilan triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah)</i> sehingga anggaran Kementerian Sosial RI Tahun 2025 setelah mengalami efisiensi menjadi sebesar RP. 78.261.210.512.000,- (<i>tujuh puluh delapan triliun dua ratus enam puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah)</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program Kementerian Sosial RI Tahun 2025, termasuk satuan tiganya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial RI kepada Komisi VIII DPR RI paling lambat tanggal 7 Februari 2025; 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI agar memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penggabungan dari tiga basis sumber data yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan data persasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat mengakomodasi aspirasi data baru atau mengoreksi data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bila terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tidak layak menerima bantuan atau KPM yang belum terdata; b. Pendamping Sosial diupayakan berasal dari daerah setempat untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas; 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. Sosialisasi dalam menentukan standar kemiskinan harus sesuai dengan indikator yang ditentukan oleh lembaga terkait dengan memperhatikan kondisi desa/kota; d. Program Sekolah Rakyat dan penanganan anak putus sekolah perlu dikoordinasikan dengan lembaga Pemerintah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang pendidikan; e. Memperkuat fungsi Balai dan Sentra dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial yang maksimal; f. Mendukung sinergi program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan target yang terukur; g. Meminta Kementerian Sosial RI untuk memberikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI. 	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Pimpinan Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025 dengan agenda membahas/menyusun program kerja.	TERTUTUP	
2.		Rapat Internal Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025, pukul 13.34 s/d 14.19 WIB dengan agenda	TERTUTUP	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Menyusun Program Kerja Komisi VIII DPR RI Masa Sidang II TS 2025-2026.		
3.	Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025, pukul 15.16 s/d 16.13 WIB dengan agenda Pengelolaan Tenaga Honorer Madrasah di daerah.	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Kkomisi VIII DPR RI dengan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat dapat di catat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat ingin mengetahui keberpihakan Pemerintah Pusat terhadap Nasib para guru honorer madrasah, menyusul adanya pengaduan dari Paguyuban Guru Honorer Madrasah ke kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan mengenai honorarium sebab sebanyak 5.567 guru honorer madrasah non-ASN, non-PPK, dan non-sertifikasi di Kabupaten Bandung Barat hanya mendapathonor Rp 1,5 juta selama satu tahun; b. Setelah melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama RI diperoleh informasi bahwa Kementerian Agama telah menyiapkan insentif untuk guru honorer madrasah dan untuk Kabupaten Bandung Barat dialokasikan kuota untuk sebanyak 360 guru dengan nilai sebesar Rp 3 juta selama satu tahun. 2. Menanggapi aspirasi dari Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Komisi VIII DPR RI memberikan catatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi VIII DPR RI telah mendorong Kementerian Agama RI untuk memperbaiki Nasib para guru honorer madrasah, namun karena keterbatasan anggaran negara maka Nasib guru honorer ini tidak hanya terjadi di lingkungan Kementerian Agama melainkan juga di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> b. Komisi VIII DPR RI juga menilai Nasib guru honorer lebih menyedihkan di wilayah-wilayah terpencil seperti di Kepulauan Maluku; c. Permasalahan mengenai guru honorer madrasah merupakan permasalahan klasik yang tidak bisa dipecahkan karena terbentur pada keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu perlu pemikiran <i>out of the box</i> seperti melakukan <i>merger</i> antara satuan Pendidikan untuk mengefisienkan penyelenggaraan Pendidikan; d. Permasalahan di Jawa Timur lebih tragis lagi sebab banyak guru ngaji di lingkungan madrasah maupun pesantren yang sama sekali tidak mendapatkan honorarium. 	
4.	Himpunan Alumni Miftahul Huda	RDPU Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2025 pukul 10.00 s.d. 11.47 WIB dengan agenda Menerima Masukan Terkait Kegiatan Pondok Pesantren Miftahul Huda Selama Bulan Ramadhan.	<p>Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VIII DPR RI dengan Himpunan Alumni Miftahul Huda (HAMIDA) dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HAMIDA adalah Himpunan Alumni Miftahul Huda, sebuah pesantren salafiyah yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1967. HAMIDA bergerak di bidang pendidikan Islam, dakwah, sosial, ekonomi, dan pengembangan masyarakat. 2. Dalam rangka menghadapi Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M, HAMIDA merekomendasikan kepada Pemerintah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong Pemerintah c.q. Kemenag dan Kemendikdasmen untuk mendukung program pesantren kilat (sanlat) di semua tingkatan, baik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, sampai Sekolah Menengah 	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Atas/Kejuruan/Madrasah Aliyah serta bekerja sama dengan Pesantren di wilayah setempat.</p> <ul style="list-style-type: none">b. Mendorong adanya dukungan anggaran dari APBN/APBD terkait dengan penyediaan bahan ajar dan insentif bagi kegiatan pesantren kilat.c. Mendorong instansi terkait untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaan kegiatan pesantren kilat.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Rapat Kerja dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025 dengan agenda Rencana Pengajuan Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2025 Kementerian P2MI/BP2MI.	Rapat Tertutup.	
2	Menteri Ketenagakerjaan RI	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB, dengan agenda: 1. Membahas implementasi kebijakan ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari Undang – Undang Cipta Kerja. 2. Perubahan Anggaran Kemnaker 2025 Pascalinpres No. 1 Tahun 2025. 3. Perubahan SOTK Kemnaker PascaPeraturan Presiden No. 164 Tahun 2024.	Rapat Tertutup	
3	Menteri Kesehatan RI	Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025, Pukul 13.00 WIB dengan agenda: 1. Efisiensi Belanja APBN 2025 dari Kemenkes RI; 2. Pergeseran anggaran Quick Wins di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.	Rapat Tertutup	

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Pimpinan dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB, dengan agenda: 1. Penyusunan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. 2. Pembentukan Panja-Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI.	Rapat Tertutup.	
2.		Rapat Internal dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB dengan agenda: 1. Pembahasan dan Penetapan Program Kerja Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. 2. Pembentukan Panja-Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI.	Rapat Tertutup.	
3.	DPRD Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025 Pukul 08.00 WIB dalam rangka Konsultasi Aspirasi Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.	Komisi IX DPR RI menerima masukan dari DPRD Kabupaten Kolaka dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara terkait aspirasi masyarakat mengenai Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana terlampir.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kepala Badan Gizi Nasional	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk pola koordinasi lintas sektor, tata kelola ketersediaan bahan baku dan sistem monitoring dan evaluasi program. 2. Membahas laporan hasil <i>pilot project</i> Program Makan Bergizi Gratis tahun 2024 dan pembelajaran untuk pelaksanaan program tahun 2025. 3. Membahas konsep dan panduan kemitraan dan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. 	Rapat Tertutup.	
5.	Kepala Badan POM RI	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas peta jalan (<i>Roadmap</i>) pelaksanaan visi Presiden dalam mewujudkan sediaan farmasi dan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperkuat ketahanan industri obat dan makanan di Indonesia, Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI agar: <ol style="list-style-type: none"> a. mempercepat adopsi dan izin edar obat inovator dengan memperjelas waktu perizinan, memperkuat sinergi dengan industri farmasi guna mempercepat hilirisasi produk obat dalam negeri; 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing.</p> <p>2. Membahas tindakan atas pelanggaran kasus pelanggaran keamanan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan.</p> <p>3. Membahas hasil pengawasan terhadap pengetatan peredaran terhadap bahan baku/bahan tambahan yang mengandung bahan berbahaya bagi produk obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan.</p>	<p>b. memastikan sediaan farmasi yang aman, bermutu, dan berdaya saing demi mengurangi ketergantungan industri kesehatan terhadap bahan baku impor yang masih tinggi;</p> <p>c. memastikan bahwa produk yang sudah ditarik tidak beredar kembali melalui <i>repackaging</i> dengan melakukan pengawasan produk yang lebih ketat;</p> <p>d. memastikan implementasi label nutrisi pada produk olahan guna mengontrol peredaran produk yang mengandung GGL tinggi (gula, garam, lemak) sebagai langkah pencegahan terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM); dan</p> <p>e. memberikan pendampingan kepada UMKM dalam produk obat bahan alam dan pangan olahan demi memastikan kualitas untuk mampu berdaya saing.</p> <p>2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional dalam pengawasan keamanan makanan (uji keamanan pangan) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga dapat meminimalisir kasus keracunan makanan di masyarakat.</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mengkaji regulasi yang jelas bagi <i>influencer</i> dalam melakukan revidu mandiri terhadap produk kosmetik dan makanan, serta memberikan kepastian hukum</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam hal peredaran kosmetik dan makanan secara <i>online</i> . 4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk lebih proaktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang sudah dinyatakan berbahaya melalui kanal informasi resmi yang dimiliki oleh Badan POM RI.	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI	Kunjungan dilaksanakan Kamis-Sabtu 6-8 Februari 2025 dalam rangka Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.	Kunjungan spesifik dilaksanakan di: 1. Provinsi Kalimantan Selatan 2. Provinsi Sulawesi Tengah 3. Provinsi Aceh	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern	Tanggal 21 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB Rapat Intern Komisi X DPR RI	(Rapat Tertutup)	
2.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Tanggal 22 Januari 2025 Pukul 09.00 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikdasmen RI	(Rapat Tertutup)	
3.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	Tanggal 23 Januari 2025 Pukul 13.30 Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek	(Rapat Tertutup)	
4.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Tanggal 23 Januari 2025 Pukul 16.30 RDPU Komisi X DPR RI dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat	1. Komisi X DPR RI dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) menyepakati hal-hal sebagai berikut : a. Diperlukan dialog terbuka antara Kemenpora RI, KONI, KOI dan organisasi olahraga untuk mencapai kesepakatan yang mendukung perkembangan olahraga secara optimal tanpa mengurangi kewenangan masing-masing pihak.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Agenda: Penyampaian usulan pemikiran dalam pengelolaan organisasi keolahragaan</p>	<p>b. Perlu dilakukan kajian ulang terhadap larangan penggunaan APBN serta Dana Hibah APBD untuk gaji pengurus dan tenaga profesional. Jika kebijakan ini tetap diterapkan, diperlukan solusi alternatif yang mendorong organisasi olahraga untuk mencari sumber pendanaan lain, seperti melalui sponsor, kemitraan strategis, atau <i>crowdfunding</i>.</p> <p>2. Komisi X DPR RI memahami usulan KONI untuk melakukan revisi terhadap Permenpora No.14 Tahun 2024 untuk menyelaraskan kebijakan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan independensi KONI dan organisasi olahraga.</p> <p>3. Komisi X DPR RI akan melakukan upaya konsultasi dengan Kemenpora RI, Kemenkum RI, pakar hukum dan olahraga untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan di dalam Permenpora No.14 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, peraturan perundang-undangan lain dan Piagam Olimpiade.</p>	
5.	<p>Kunjungan Kerja Spesifik</p>	<p>Tanggal 30 Januari – 1 Februari 2025 Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kerja BPS (Mekanisme Rekrutmen SDM/Petugas Sensus Ekonomi 2026) ke Kota Denpasar, Kota Medan, dan Kota Palembang (Data BPS sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan Pendidikan).</p>	<p>Rekomendasi Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Denpasar, Provinsi Bali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, dan mendorong Badan Pusat Statistik untuk intensif berkoordinasi dengan BPS provinsi Bali untuk melakukan segala persiapan dengan sebaik-baiknya sejak pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dengan para <i>stakeholder</i> lokal, penyediaan data awal, dan senantiasa memperhatikan pengamanan dan perlindungan untuk petugas dan seluruh pihak yang terlibat. • Komisi X DPR RI mendorong terus adanya peningkatan kualitas petugas, sejak proses rekrutmen, pelatihan-pelatihan, hingga pendampingan saat pelatihan. • Komisi X DPR RI mendorong peran serta seluruh pemangku 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kepentingan dan OPD untuk berperan aktif memberikan kontribusi persiapan dan pelaksanaan hingga membantu pengawasan di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait kualitas data, komisi X DPR RI mendorong agar menggunakan metodologi yang terukur dan akurasi data terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. • Sensus sektoral isu-isu yang ada di daerah, BPS melakukan pendampingan untuk menjawab permasalahan sektoral tersebut. 	
			<p>Rekomendasi Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI mendorong BPS Sumatera Utara untuk melakukan perekrutan serta memberikan pelatihan terhadap petugas sensus yang akan turun ke Masyarakat. • Komisi X DPR RI mendorong BPS Sumatera Utara dan Petugas sensus harus mampu melakukan kalaborasi dengan menggandeng tokoh masyarakat atau relawan lokal untuk membantu menjangkau dan meyakinkan responden agar berpartisipasi. • Komisi X DPR RI mendorong BPS Sumatera Utara dan Petugas Sensus. Segera melakukan pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi daerah yang sulit dijangkau dan merencanakan rute yang efisien. • Komisi X DPR RI mendorong BPS Sumatera Utara dan Petugas Petugas Sensus untuk memanfaatkan aplikasi mobile atau platform digital untuk memudahkan pengumpulan data di lokasi yang sulit dijangkau. 	
			<p>Rekomendasi Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menjadikan data statistik pendidikan yang dihasilkan BPS RI sebagai basis 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>utama data pendidikan di Indonesia dengan catatan data tersebut hasil kolaborasi bersama Kemendikdasmen RI dan Kemdiktisaintek RI.</p> <p>2. Komisi X DPR RI mendesak BPS RI untuk mengembangkan output data statistik pendidikan yang ada selama ini, agar datanya menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan.</p> <p>3. Komisi X DPR RI mendorong BPS RI untuk meningkatkan kolaborasi dengan K/L lain, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat sebagai upaya peningkatan akurasi data, khususnya data bidang pendidikan.</p>	
6.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	<p>Tanggal 3 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora Agenda: Membahas Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Tim Henri Victor Geypens, Sdr. Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Sdr. Ole Lennard ter Haar Romenij.</p>	<p>1. Komisi X DPR RI memperhatikan dan menimbang permohonan pertimbangan Kewarganegaraan RI, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:</p> <p>a) Surat masuk dari Presiden RI No. R-04/Pres/01/2025 dan No. R-05/Pres/01/2025 tertanggal 15 Januari 2025, dan No. R-08/Pres/01/2025 tertanggal 22 Januari 2025, perihal Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Tim Henri Viktor Geypens, Sdr. Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Sdr. Ole Lennard Ter Haar Romenij.</p> <p>b) Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 20 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; 2) Pasal 99 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; 3) Pasal 15 PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP No. 21 Tahun 2022; 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4) Pasal 11 PP No. 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;</p> <p>5) Permenkumham No. 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan.</p> <p>2. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sdr. Tim Henri Viktor Geypens, Sdr. Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Sdr. Ole Lennard Ter Haar Romenij, dengan catatan bahwa pewarganegaraan atlet:</p> <p>a. harus menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun dan mengembangkan ekosistem persepakbolaan nasional, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tetapi juga mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepakbola secara keseluruhan.</p> <p>b. harus dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat rasa persatuan, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda, sehingga tidak hanya berkontribusi pada prestasi olahraga, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa.</p> <p>3. Hasil Rapat Kerja hari ini disampaikan kepada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 Februari 2025 untuk diambil keputusan. Komisi X DPR RI, Pemerintah dan PSSI, menyepakati bahwa penetapan Kewarganegaraan RI, ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
7.	Kementerian Kebudayaan	Tanggal 4 Februari 2025 Pukul 12.30	1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kementerian Kebudayaan RI atas realisasi anggaran sampai akhir Desember 2024 sebesar	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan</p> <p>Agenda: Evaluasi kinerja dan anggaran TA 2024 dan persiapan pelaksanaan program kerja dan anggaran TA 2025. Membahas isu-isu terkini yang sedang berkembang.</p>	<p>Rp2.792.230.105.000 (<i>dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh juta seratus lima ribu rupiah</i>) atau sebesar 98,71% dari pagu (setelah blokir) sebesar Rp3.150.037.548.000 (<i>tiga triliun seratus lima puluh miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah</i>).</p> <p>2. Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Kebudayaan RI untuk menjadikan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun 2024, sebagai landasan perbaikan kinerja tahun 2025 menjadi lebih baik dan terealisasi sesuai target, dengan beberapa catatan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menekankan pentingnya evaluasi terkait akulturasi dan revitalisasi budaya dalam implementasi program tahun 2024 untuk perbaikan tahun 2025. b. Menekankan monitoring dan evaluasi untuk terus ditingkatkan dalam memastikan program dan kegiatan tepat sasaran serta sesuai target. c. Kementerian Kebudayaan RI agar mengevaluasi Sistem Pendataan Kebudayaan mengenai Pokok-Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan (PPKD), khususnya bagi daerah yang belum mengirimkan PPKD. <p>3. Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan RI akan melakukan kajian mengenai pentingnya Badan Bahasa masuk dalam struktur Kementerian Kebudayaan RI, sebagai upaya untuk melakukan pemajuan kebudayaan.</p>	
8.	Kementerian Kebudayaan	<p>Tanggal 4 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan</p>	(Rapat tertutup)	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
9.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Tanggal 4 Februari 2025 Pukul 16.00 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga	(Rapat tertutup)	
10.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Tanggal 4 Februari 2025 Pukul 17.00 WIB Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Agenda: 1. Evaluasi kinerja dan anggaran TA 2024 dan persiapan pelaksanaan program kerja dan anggaran Kemenpora TA 2025. 2. Membahas isu-isu terkini yang sedang berkembang	1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI atas realisasi anggaran TA 2024 sebesar Rp2.688.766.596.453,- (<i>dua triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah</i>) atau sekitar 98,43% dari pagu (setelah blokir) sebesar Rp2.792.362.687.000,- (<i>dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah</i>). 2. Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk menjadikan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja TA 2024 sebagai landasan perbaikan dan realisasi kinerja TA 2025. 3. Komisi X DPR RI akan menjadwalkan Raker/RDP/RDPU dengan Kemenpora RI, KONI, KOI, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan pemangku kepentingan olahraga, terkait pelaksanaan Permenpora No. 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025.	
11.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Tanggal 5 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB RDP Komisi X DPR RI dengan BRIN Agenda: 1. Evaluasi kinerja dan anggaran TA 2024 dan	1. Komisi X DPR RI mengapresiasi BRIN RI atas realisasi anggaran TA 2024 sebesar Rp4.995.823.262.536 (<i>empat triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah</i>) atau sekitar 88,82% dari pagu setelah <i>Automatic Adjustment</i> sebesar Rp5.624.543.555.000 (<i>lima triliun enam ratus dua puluh</i>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>persiapan pelaksanaan program kerja dan anggaran BRIN TA 2025.</p> <p>2. Membahas isu-isu strategis terkait riset dan inovasi nasional.</p> <p>3. Membahas terkait pelaksanaan penarikan peneliti daerah ke pusat.</p>	<p>empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).</p> <p>2. Komisi X DPR RI dan BRIN sepakat untuk menjadikan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja Tahun 2024 sebagai landasan perbaikan dan realisasi kinerja TA 2025, dengan beberapa catatan:</p> <p>a. BRIN memperkuat hasil riset dengan melakukan restrukturisasi program bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat, yang fokus pada penyelarasan materi dan metode bimtek dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil riset dapat diimplementasikan secara praktis dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.</p> <p>b. BRIN memperkuat upaya hilirisasi hasil riset agar temuan-temuan yang dihasilkan tidak hanya berakhir sebagai dokumen atau arsip, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.</p> <p>c. BRIN perlu memanfaatkan dana abadi riset secara optimal agar dapat mendukung kegiatan penelitian yang berdampak pemotongan anggaran, sehingga keberlanjutan dan kualitas riset tetap terjaga.</p> <p>d. BRIN untuk segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana abadi riset TA 2024.</p> <p>e. Untuk memastikan penelitian yang efisien dan relevan dengan perkembangan global, BRIN perlu mengembangkan infrastruktur riset yang canggih, berbasis digital, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.</p>	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>f. Untuk meningkatkan daya guna hasil riset, BRIN memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri guna mendorong hilirisasi, komersialisasi, dan pemanfaatan inovasi secara lebih luas oleh masyarakat maupun industri.</p> <p>g. BRIN melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>h. BRIN akan memfokuskan riset dan inovasi untuk mendukung program kemandirian pangan sesuai dengan yang tertuang dalam ASTA CITA.</p> <p>3. Berkaitan dengan kebijakan homebase, BRIN perlu melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan ketersediaan periset yang ada di daerah sesuai dengan cakupan kepakaran dari setiap Pusat Riset (PR).</p> <p>4. BRIN perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.</p>	
12.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	<p>Tanggal 5 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala BRIN Agenda: Membahas perubahan dan dampak perubahan pagu anggaran terhadap program kerja BRIN sesuai Inpres</p>	(Rapat tertutup)	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.		
13.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PBPGSI) 2. Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) iGTK 02 SMA-SMK 3. Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG Indonesia 4. Forum Guru Swasta Nasional <i>Passing Grade</i> Tahun 2023 	<p>Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB RDPU Komisi X DPR RI</p> <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian aspirasi terkait dengan skema peningkatan kesejahteraan guru-guru sekolah swasta dan madrasah swasta (Non ASN). 2. Penyampaian aspirasi tunjangan profesi guru (TPG). 3. Penyampaian sikap, aspirasi, dan harapan Guru-guru Sertifikasi Swasta PLPG Indonesia. 4. Penyampaian aspirasi tentang permasalahan honorer, seleksi CPNS dan PPPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada PB PGSI, Forum PPPK iGTK 02 SMA-SMK, IGSS PLPG Indonesia, Forum Guru Swasta Nasional <i>Passing Grade</i> Tahun 2023 yang telah menyampaikan paparan, pandangan dan masukan mengenai permasalahan guru dan tenaga kependidikan sebagaimana terlampir, dan akan menjadi rujukan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemerintah. 2. Terhadap paparan aspirasi, pandangan dan masukan dari PB PGSI, Forum PPPK iGTK 02 SMA-SMK, IGSS PLPG Indonesia, Forum Guru Swasta Nasional <i>Passing Grade</i> Tahun 2023, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi X DPR RI menilai perlu adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait rekrutmen, kompetensi, serta kepastian status tenaga pendidik agar lebih adil dan transparan, sehingga dapat memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para guru. b. Komisi X DPR RI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berpihak pada tenaga pendidik, guna mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. c. Komisi X menekankan agar Pemerintah melaksanakan amanat konstitusi antara lain Pasal 31 Undang-Undang Dasar NRI 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pasal 40 Ayat (1), dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 16 ayat (2).</p> <p>3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan PB PGSI, Forum PPPK IGTK 02 SMA-SMK, IGSS PLPG Indonesia, dan Forum Guru Swasta Nasional <i>Passing Grade</i> Tahun 2023, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Pemerintah.</p>	
14.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Pejuang Pendidikan Nonformal dan Informal (DPN APPNFI) 2. Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia. 3. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional (DPP ASTINA) 4. Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) 	<p>Tanggal 6 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB RDPU Komisi X DPR RI Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian aspirasi terkait revitalisasi Pendidikan Nonformal dan Informal di Indonesia (rekomendasi hasil kegiatan Jambore Nasional Pendidikan Nonformal dan Informal di Malang tanggal 10—13 Januari 2025). 2. Audiensi dan silaturahmi. 3. Penyampaian aspirasi dan pandangan isu-isu pendidikan kesetaraan, khususnya terkait peran tutor dalam memajukan pendidikan non-formal. 	<p>Terhadap aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh para narasumber sebagaimana angka 1 di atas, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendukung revitalisasi program PNFI untuk penguatan pengelolaan dan peningkatan anggaran yang memadai untuk program-program PNFI di Kemendikdasmen RI. b. Akan menyampaikan usulan revisi Perpres 188 Tahun 2024 tentang Organisasi Kemendikdasmen RI kepada pemerintah, untuk mengembalikan Ditjen PNFI dalam struktur Kemendikdasmen RI. c. Mendukung perlunya regulasi/payung hukum untuk penguatan tutor pendidikan kesetaraan, yang meliputi standar kualifikasi dan kompetensi, serta kesejahteraan tutor, untuk memastikan tutor bekerja secara profesional. d. Mendukung PKBM sebagai lembaga atau wadah penyelenggara PNFI dalam masyarakat ditingkat terendah (desa/kelurahan). e. Merevisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang terintegrasi dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		4. Penyampaian aspirasi tentang upaya peningkatan kualitas PTK PAUD NonFormal.	Dosen, untuk mengakui dan mengakomodasi hak profesi pendidik PAUD Nonformal, pendidik kesetaraan dan pendidik keaksaraan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 3 Februari 2025.	Program Kerja dan Anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan	Tertutup.
2.	Ketua Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 3 Februari 2025	Rencana Kerja dan Anggaran Badan Supervisi	Tertutup.

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Internal Komisi XI DPR RI	Rapat dilaksanakan tanggal 22 Januari 2025 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Jadwal Acara Rapat Komisi XI DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025.	Tertutup.	
2.	Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Pengawasan Bank	Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Banten (Kota Tangerang Selatan) pada tanggal 30 Januari s.d 1 Februari 2025. Kunker	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Perekonomian Rakyat tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2025.</p>	<p>Spesifik dipimpin oleh Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., Ketua Komisi XI DPR RI, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.</p> <p>Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan tema Bank Perekonomian Rakyat.</p> <p>Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H, selaku Ketua Tim Kunker Spesifik ingin mengetahui penjelasan lebih dalam dari LPS tentang Bank Perekonomian Rakyat. terutama posisi BPR di Provinsi Banten. Bagaimana perkembangan BPR/BPRS setelah penerapan UUP2SK, penerapan modal inti, CKPN, Sumber Daya Manusia (SDM), IT (<i>Information and Technology</i>), serta kontribusi BPR/BPRS untuk mendukung perekonomian nasional. Ke depan kita harus meyakinkan concern LPS yang lebih tinggi dalam penanganan dan penyelesaian BPR/BPRS di Provinsi Banten.</p> <p>Didik Madiyono selaku Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS memaparkan bahwa Kinerja Intermediasi BPR/BPRS di Banten Tumbuh Positif. Pertumbuhan aset, DPK, kredit/pembiayaan di Banten relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total industri BPR/BPRS secara nasional. Jumlah BPR/BPRS yang beroperasi di Banten per 30 November 2024 adalah 60 BPR/BPRS yang terdiri atas 51 BPR dan 9 BPRS.</p> <p>Secara umum, terdapat pertumbuhan positif pada DPK BPR/BPRS di Provinsi Banten, baik tahunan atau kuartalan. Dari 4 kabupaten dan 3 kota di Banten, kabupaten/kota dengan total aset, kredit, dan DPK</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan. Porsi aset BPR/BPRS di Kota Tangerang Selatan sebesar 31,7% dari total BPR/BPRS di Banten.</p> <p>Rata-rata suku bunga deposito BPR di Banten berada di bawah Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, namun relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata suku bunga BPR nasional.</p> <p>Kepesertaan dan Cakupan Penjaminan di Banten total sebanyak 62 Bank, yang terdiri dari: 2 Bank Umum dan 60 BPR/BPRS. Bank Umum terdiri dari: 2 Bank Konvensional sedangkan BPRS terdiri dari: 51 Bank Konvensional dan 9 Bank Syariah.</p> <p>Sejak beroperasi tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2024, LPS telah melakukan penanganan terhadap 8 BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya di Banten. LPS membayarkan sebesar Rp72,8 miliar dari total simpanan layak bayar sebesar Rp74,15 miliar setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS Rp2 miliar, <i>set-off</i> terhadap pinjaman dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.</p> <p>LPS terus berupaya mempercepat pembayaran klaim penjaminan yang kini mulai dapat dilakukan 5 hari kerja sejak BPR/BPRS dicabut izin usahanya. Salah satu strateginya adalah dengan mempersiapkan rekonver saat melakukan uji tuntas. Mayoritas BPR/BPRS di Banten Mematuhi Ketentuan Program Penjaminan Simpanan LPS.</p>	
3.	Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Pencetakan Uang tanggal 30 Januari-1 Februari 2025.	<p>Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Karawang) pada tanggal 30 Januari – 01 Februari 2025. Kunspek dipimpin oleh H. Fauzi Amro, M.Si. selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.</p> <p>Kunker Reses Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) yang dihadiri oleh Bapak Doni P. Joewono Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Anwar Bashori Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang, Bapak Ramdan Denny Prakoso Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Bapak Hari Widodo Direktur DPU, Sementara dari PERURI dihadiri oleh Ibu Dwina Septian Direktur Utama Peruri dan Bapak Marlison Hakim selaku Ketua Dewan Pengawas. Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunspek Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, M.Si, menyampaikan bahwa Sebagai Bank Sentral yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia berdasarkan UU Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, gerak langkah BI harus seirama dengan semua <i>stakeholder</i> untuk bisa mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi segenap tumpah darah Indonesia sesuai amanat dari UUD NRI tahun 1945.</p> <p>Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sesuai amanat UU P2SK, BI memiliki salah satu kewenangan pengelolaan uang melalui kebijakan <i>printing money</i> termasuk uang digital. Dalam menjaga uang layak edar dimasyarakat juga perlu diperhatikan oleh BI melalui kewenangan <i>Clean Money Policy</i> untuk memastikan setiap rupiah yang beredar dimasyarakat itu bersih, bagus dan berkualitas. Selain itu, salah satu kewenangan BI terhadap pengelolaan uang rupiah adalah pemusnahan uang yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan yang ada.</p> <p>Fauzi dalam sambutannya juga menyampaikan issue terkait maraknya peredaran uang palsu. Beliau mengatakan bahwa baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita maraknya peredaran uang palsu di beberapa daerah. Peredaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan ditahun 2024, beberapa diantaranya yaitu kasus uang palsu di UIN Alaudin Makassar, kasus uang palsu di wilayah Cirebon dan kasus uang palsu di Kalimantan Utara. Peredaran uang palsu ini dapat merugikan perekonomian negara, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan dapat menyebabkan kerugian <i>financial</i> baik bagi individu maupun bisnis. Selain itu, di kuartal 1 Tahun 2025 kita juga melalui banyak momen hari libur nasional dan hari besar keagamaan seperti tahun baru Imlek, hari raya Nyepi dan hari raya Idul Fitri. Tren masyarakat kita dalam menjalani hari libur panjang nasional khususnya dalam perayaan menyambut hari besar keagamaan itu selalu seiring dengan peningkatan peredaran uang dan peningkatan konsumsi masyarakat yang dapat menggerakkan roda perekonomian tetapi jika tidak terkontrol dan diawasi maka bisa memicu peningkatan harga barang terutama harga bahan pokok. Menyikapi hal ini maka peran BI bersama Pemerintah dan semua <i>stakeholder</i> sangat diharapkan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk mencegah laju inflasi yang tak terkendali.</p> <p>Atas dasar beberapa topik tersebut, DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terdorong untuk melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Bank Indonesia khususnya PERURI yang ada di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Adapun dalam kegiatan ini kami ingin melihat lebih dalam bagaimana kondisi aktual dari Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia melalui PERURI tutup H. Fauzi Amro selaku ketua tim</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI. Di Akhir pertemuan, tim Kunspek Komisi XI DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik hari ini juga ingin memastikan Bank Indonesia selaku mitra kerja Komisi XI DPR RI telah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh UU P2SK yaitu melakukan langkah-langkah strategis guna berperan dan bersinergi dengan semua lembaga yang telah diatur dalam undang-undang untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kewenangan yang diamanatkan.</p>	
4.	Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dalam rangka Pengawasan terkait strategi peningkatan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM tanggal 30 Januari s.d 1 Februari 2025.	<p>Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, Komisi XI DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Tegal, Jawa Tengah dalam rangka pengawasan terkait strategi peningkatan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Kerja Spesifik ini dipimpin oleh Bapak Mohamad Hekal, MBA., sebagai Ketua Tim Kunspek dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. M. Hanif Dhakiri M.Si., serta anggota Komisi XI DPR RI sebagai berikut Dr. Ir. Harris Turino, S.T., S.H., M.Si., M.M., Dr. H. Musthofa, S.E., M.M., Didik Haryadi, S.T., S.H., H. Kamrussamad, Ph.D., R.H. Imron Amin, S.H., M.H., Julie Sutrisno Laiskodat, Alamuddin Dimiyati Rois, Dr. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M., dan H. Ahmad Najib Qodratullah, S.E.</p> <p>Kunjungan Kerja Spesifik ini juga turut dihadiri oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dipimpin oleh Friderica Widayari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Sumarjono, Kepala OJK Prov Jawa Tengah, Pak Noviyanto Utomo, Kepala OJK Tegal, Ibu Indah Iramadhini - Plt. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bapak Edwin Nurhadi - Direktur Inklusi Keuangan, dan Bapak M. Fredly Nasution, Direktur Hubungan Kelembagaan serta BPD Prov Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Wiweko Probojakti, Direktur IT,</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Konsumer dan Jaringan.</p> <p>Salah satu kendala utama UMKM adalah akses terhadap fasilitas kredit dari perbankan nasional. Oleh karena itu Kami mendorong agar akses ini ditingkatkan dan dipermudah melalui kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai salah satu Mitra Kerja Komisi XI DPR RI, OJK berperan penting dalam memperkuat perekonomian rakyat dalam bentuk meningkatkan literasi keuangan dan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, meningkatkan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung. Oleh karena itu, OJK diharapkan mendorong dan mengawasi lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik, sehingga dapat menjaga kualitas kredit meskipun fokus pada segmen yang berisiko lebih tinggi. Dengan regulasi yang mendukung, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, sehingga target Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai, khususnya dalam peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan ekonomi desa, dan penciptaan lapangan kerja.</p>	
5..	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 2. Direktur Utama PT. Taspen (Persero). 	<p>Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan tanggal 6 Februari 2025 dengan agenda Pembayaran Pensiun.</p>	<p>Komisi XI DPR RI bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT. Taspen (Persero) menyepakati hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT. Taspen (Persero) tentang pembayaran pensiun bagi ASN. 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan membangun dan meningkatkan sinergi BUMN dalam rangka penyaluran pembayaran pensiun oleh kas negara kepada penerima pensiun. 3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan PT. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Taspen (Persero) meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pensiun terutama kepada penerima pensiun usia lanjut yang tidak terjangkau dengan sistem keuangan digital.</p> <p>4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melaksanakan reformasi sistem pembayaran pensiun untuk memberikan manfaat yang lebih baik dengan tetap menjamin keberlangsungan program dan meminimalkan beban fiskal pembayaran pensiun di APBN.</p> <p>5. PT. Taspen (Persero) meninjau pelaksanaan pembayaran pensiun melalui Bank asing.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern Panja Migas	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.	Pembahasan Program Kerja Panja.	
1.	Duta Besar Singapura	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. <i>Courtesy Call</i> dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 15.00 WIB.	<i>Courtesy call</i> dengan Duta Besar Singapura dalam rangka penguatan kerja sama Bilateral RI-Singapura di Sektor Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup.	
2.	Wakil Menteri ESDM	a. Pelaksanaan undang -undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 12.00 WIB.	Rencana Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Gubernur Kepri, KADIN Kepri, Dirut PT Batamindo Investment Cakrawala, Dirut PT Panbil Utilitas Sentosa, dan Dirut PT Tunas Energi	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Umum dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Pasokan dan Harga gas untuk Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik dan Industri di Kepulauan Riau. 2. Lain-lain.	
4.	Dirjen Migas KESDM RI, Kepala SKK Migas, Dirut PT PGN Tbk dan Dirut PT PLN (Persero) (dengan menghadirkan Dirut PLN Batam)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Panja Migas dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 15.00 WIB.	1. Pasokan dan Harga gas untuk Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik dan Badan Usaha yang beroperasi di <i>midstream</i> serta Industri di Kepulauan Riau. 2. Lain-lain.	
5.	Sekjen dan Dirjen Migas KESDM RI, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Panja Migas dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, pukul 19.00 WIB.	1. Evaluasi pelaksanaan pendistribusian solar, BBM bersubsidi, dan LPG 3kg. 2. Lain-lain.	
6.	Rapat Internal Panja Listrik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2025, pukul 13.00 WIB.	Program kerja panja.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Intern Pimpinan dan Anggota Komisi XIII	<ol style="list-style-type: none">Program Kegiatan/Jadwal Kegiatan Komisi XIII DPR RI MS II TS 2024-2025;Membahas RUU Prioritas Komisi XIII DPR RI (RUU Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban).Menetapkan Daerah Kunker Reses MP II TS 2024-2025. <p>Dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.</p>		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Mahasiswa FH Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Jawa Timur	Rapat Audiensi dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025, pukul 09.00 WIB.	Komisi XIII mengapresiasi Kunjungan Mahasiswa FH Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.	
3.	LPSK	<p>Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendalaman atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025; 2. Penyiapan penyusunan RUU Perubahan kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban; 3. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XIII DPR RI sangat prihatin terhadap penurunan anggaran LPSK dari Rp.278.526.225.000 (<i>Dua ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah</i>) pada 2024 menjadi Rp.229.919.355.000 (<i>Dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah</i>) pada 2025. Dari angka tersebut, efisiensi anggaran lebih lanjut sebesar Rp.144.500.000.000 (<i>Seratus empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) menyebabkan anggaran efektif hanya Rp.85.419.355.000, (<i>Delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah</i>) sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja LPSK dalam mendukung instruksi Presiden untuk optimalisasi dan efisiensi anggaran tahun 2025. 2. Komisi XIII mendukung program efisiensi anggaran LPSK dari Rp229.919.355.000 (<i>Dua ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah</i>) yang semula berkurang Rp144.500.000.000 (<i>Seratus empat</i> 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p><i>puluh empat miliar lima ratus juta rupiah)</i> untuk dialokasikan kembali sejumlah Rp.79.636.829.000 (<i>Tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)</i> sehingga usulan anggaran LPSK menjadi Rp.165.056.184.000 (<i>Seratus enam puluh lima miliar lima puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).</i></p> <p>3. Komisi XIII meminta LPSK untuk menyampaikan kembali secara rinci program-program sebagaimana yang diusulkan dengan jumlah sebesar Rp165.056.184.000 (<i>Seratus enam puluh lima miliar lima puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).</i></p> <p>4. LPSK harus memastikan efisiensi tidak menghambat layanan utama khususnya anggaran yang memastikan efektivitas program perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.</p> <p>5. Posisi atau kedudukan LPSK dalam memberikan perlindungan para saksi dan korban, memerlukan penguatan atas kewenangan LPSK dalam memenuhi hak saksi dan korban dalam sistem hukum peradilan pidana dan dalam hubungan dengan lembaga lainnya serta perlu diperkuat melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Kepala BPIP	Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB dengan agenda Pendalaman atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XIII meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktifitas kinerja BPIP. 2. Komisi XIII meminta kepada BPIP untuk memberikan jawaban tertulis atas semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi XIII paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. 	
5.	Menteri HAM RI	<p>Rapat Kerja Komisi XIII dilaksanakan pada, Rabu 5 Februari 2025 Pukul 10.00 WIB dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Amnesti; 2. Perlindungan HAM terhadap WNI dan Pekerja migran di dalam dan luar negeri; 3. Dampak penetapan PSN terhadap HAM masyarakat sekitar; 4. Rencana kerja dan Anggaran 2025; 5. Masalah Aktual lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi rencana kebijakan strategis nasional Kementerian Hak Asasi Manusia untuk atensi dan berprosesnya penanganan HAM di Indonesia. 2. Komisi XIII DPR RI meminta Kementerian HAM menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2024 (berdasarkan anggaran yang diterima oleh Dirjen HAM) sejalan dengan rencana mengajukan relaksasi anggaran tahun 2025. 3. Komisi XIII DPR RI meminta kepada Menteri HAM untuk memberikan jawaban tertulis atas semua tanggapan dan masukan anggota Komisi XIII DPR RI paling lambat, tanggal 14 Februari 2025. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Kunker Spesifik Komisi XII ke 3 daerah, yaitu : 1. Kepulauan Riau, Batam; 2. Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta; 3. Sulawesi Selatan, Makassar.	Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Batam dilaksanakan 6-8 Februari 2025.	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan tugas dan kondisi keimigrasian di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelayanan dari imigrasi tidak diskriminatif terhadap siapapun tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kewaspadaan dan SOP. 2. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran 2024 sebesar 98.61% dari total pagu dan peningkatan perolehan PNBPN yang meningkat sebesar 272% dari target PNBPN serta prestasi lainnya. 3. Komisi XIII DPR RI mendukung program <i>Visa on Arrival</i> (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan yang meningkatkan kedatangan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau. 4. Komisi XIII DPR RI mendukung program kerja sama dengan Imigrasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan. 	
		Kunker Spesifiki Komisi XIII ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi XIII DPR RI telah mendengarkan pemaparan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan tugas dan kondisi perkembangan paten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyampaikan dukungan terhadap upaya untuk: 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Memperkuat peran pemangku kepentingan di daerah agar dapat memperkuat dan mendukung perlindungan hak paten yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;</p> <p>b. Mendorong kantor wilayah sebagai pelopor pelaksana kebijakan agar dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan perlindungan paten di tingkat Daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan;</p> <p>c. Mendorong sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, serta Komunitas Riset sehingga tercipta ekosistem inovasi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi. Untuk itu, Rapat Dengar Pendapat merekomendasikan perlunya dukungan penganggaran yang memadai untuk pengembangan Hak Kekayaan Intelektual.</p> <p>2. Tim Kunker Spesifik Komisi XIII DPR RI dapat menerima penjelasan dan akan meneruskan hal-hal yang disampaikan oleh Jajaran Dirjen Kekayaan Intelektual khususnya Kanwil</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>Kunker Spesifik Komisi XIII ke Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Makassar, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2025.</p>	<p>Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum RI.</p> <p>Rapat dengan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan, Sulawesi Selatan, Makassar menghasilkan dua poin penting, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kunjungan kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI telah mendengarkan pemaparan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait tugas dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan & Rumah Tahanan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan (baik sarana, prasarana serta SDM) dan mendukung <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Re-organisasi Lapas dan Rutan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan Koordinasi dan Sinergi; b. Peningkatan Kapasitas/Jumlah Petugas Pemasyarakatan (SDM) dan tenaga ahli; c. Modernisasi Infrastruktur dan Teknologi Lapas; d. Penambahan anggaran dalam peningkatan fungsi pengawasan dan kebutuhan konsumsi bagi warga binaan di Lapas. 1.2 Penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kompetensi dalam rangka 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>meningkatkan pelayanan masyarakat terdapat jarak antara jumlah Warga Binaan dengan jumlah pegawai lapas.</p> <p>1.3 Pemberian Amnesti/Grasi dan program rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana psikotropika dan tahanan politik bersenjata dan tahanan politik papua dapat di kembalikan ke Lapas Provinsi Papua dalam menyelesaikan persolan <i>over capacity</i> Lapas.</p> <p>2. Tim Kunker Spesifik Komisi XIII DPR RI dapat menerima penjelasan dan akan meneruskan hal-hal yang disampaikan oleh jajaran Dirjen Masyarakat khususnya Kanwil Masyarakat Sulawesi Selatan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Imigrasi dan Masyarakat RI.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Rapat Baleg dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025 pukul 13.50 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025 & Presentasi Tim Ahli dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Masa Sidang II Tahun Sidang 2024—2025 akan diisi dengan kegiatan untuk penyusunan RUU yang telah disiapkan Badan Legislasi. - Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025 yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. - Rapat Dengar pendapat Umum dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dijadwalkan pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2024—2025. - Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik akan didahului dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Badan Pusat Statistik dan para pakar. - Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RUU tersebut. 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025 pukul 10.36 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh para Narasumber akan menjadi bahan masukan Badan Legislati dalam penyusunan dan penyempurnaan draf RUU. - Pimpinan dan Anggota Badan Legislati mengharapkan para Narasumber dapat ikut serta aktif dalam proses pembahasan RUU tersebut bersama Pemerintah. 	
3.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025 pukul 14.20 WIB.	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, dan <i>Association of Indonesian Energy, Mineral, and Coal Suppliers</i> (ASPEBINDO) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber dalam RDPU akan menjadi bahan pertimbangan untuk RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>	
4.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	RDP/RDPU dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025 pukul 13.37 WIB.	Badan Legislati melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral Republik Indonesia (DPP)	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>AIMRI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Kesimpulan: Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber dalam RDP/RDPU akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>	
5.	<p>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p>	<p>Rapat Baleg dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2025 pukul 10.37 WIB.</p>	<p>Badan Legislati melaksanakan rapat penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Presentasi Tim Ahli).</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan didahului dengan mengundang pihak-pihak terkait dan para pakar/Narasumber. - Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislati akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. - Menugaskan Tim Ahli untuk menyempurnakan draf penyusunan RUU sesuai masukan dari Anggota. 	
6.	<p>RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</p>	<p>RDPU dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2025 pukul 13.54 WIB.</p>	<p>Badan Legislati melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Jaringan Buruh Migran (JBM), Federasi Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia (SEBUMI-KSBSI), dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kesimpulan: Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	
7.	<p>RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</p>	<p>RDPU dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025 pukul 13.20 WIB.</p>	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan <i>Publish What You Pay</i> Indonesia (PWYP) dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>Kesimpulan: Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>	
8.	<p>Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib</p>	<p>Rapat Baleg dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025 pukul 15.24 WIB.</p>	<p>Badan Legislasi melaksanakan rapat pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyepakati pasal 228A ayat (1): Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPR - Menyepakati pasal 228A ayat (2): hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi 	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P DEMOKRAT) menyetujui hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
9.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	RDPU dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2025 pukul 13.33 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A., Asosiasi Lembaga Pelatihan P4MI, dan International Labour Organization (ILO For Indonesia) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p> <p>Kesimpulan: Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 pukul 13.40 WIB.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI), Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), dan LPK KOFUKU dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kesimpulan: Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	
11.		Rapat Baleg dilaksanakan pada Kamis, 6 Februari 2025.	<p>Badan Legislasi melaksanakan Rapat pembahasan penugasan RUU oleh Pimpinan DPR RI kepada Badan Legislasi.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Legislasi akan melaksanakan rapat-rapat pembahasan RUU sesuai dengan penugasan Pimpinan DPR RI sebagaimana Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah. - Pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan segera dijadwalkan setelah adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah. Adapun untuk pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Pilkada diawali dengan kegiatan RDP/RDPU. - Masa sidang II menjadwalkan akan menyelesaikan 6 RUU, RUU Minerba dan RUU perkoperasian sebagai RUU yang berasal dari daftar kumulatif terbuka dan 4 RUU yang berasal dari daftar Prolegnas RUU Prioritas, yaitu RUU tentang PPMI, RUU tentang Statistik, RUU tentang Pertekstilan, dan RUU tentang Komoditas Strategis. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Pimpinan dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas Program Kerja MKD Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025; 2. Membahas pengaduan yang masuk dan yang sedang dalam proses; 3. Dan lain-lain. 	
2.		Rapat Intern dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan Mengesahkan Program Kerja MKD Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025; 2. Membahas pengaduan yang masuk dan yang sedang dalam proses; 3. Dan lain-lain. 	
3.	DPRD Kabupaten Pekalongan	Menerima Audiensi dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2025.	Konsultasi tentang penguatan Badan Kehormatan DPRD.	
4.		Rapat Penyelidikan dan Verifikasi dilaksanakan pada Jumat, 31 Januari 2025.	Permintaan keterangan Anggota DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik.	
5.		Paket <i>Meeting</i> Kopo dilaksanakan pada Minggu-Selasa, 2-4 Februari 2025.	Tema “Mengukur dan Menakar Perilaku Pantas Anggota Dewan Dalam Berperilaku Terhadap Masyarakat yang Bersesuaian dengan Etik dan Hukum yang Hidup di Dalam Masyarakat”.	
6.	DPRD Kabupaten Kepulauan Sula	Menerima Audiensi dilaksanakan pada Kamis, 6 Februari 2025.	Konsultasi terkait tata cara pelaksanaan sidang kode etik DPRD.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Menerima Audiensi dilaksanakan pada Jumat, 20 February 2025.	Konsultasi terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik Anggota DPRD.	
8.	DPRD Kabupaten Lampung Timur	Menerima Audiensi dilaksanakan pada 20 February 2025.	Konsultasi tentang tata beracara dan kode etik Badan Kehormatan (BK).	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Pimpinan BURT Selasa, 21 Januari 2025. Agenda: Pembahasan Rancangan Jadwal Kegiatan BURT MS II TS 2024-2025.		--
2.		Rapat BURT (Intern) Selasa, 21 Januari 2025. Agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS II Tahun Sidang 2024-2025.		
3.	Pimpinan AKD dan Sekretariat Jenderal DPR RI	Rapat BURT Selasa, 23 Januari 2025. Agenda: Penyerahan DIPA AKD Tahun 2025.	AKD akan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran Tahun 2025, agar target kinerja realisasi Anggaran DPR RI dapat tercapai.	
4.	Program Jamkestama	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama, Tanggal 25-27 Januari 2024 ke Lampung.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 	
5.	Bandara Radin Inten II Lampung	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan bandara Tanggal 25-27 Januari 2025.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di Bandara Radin Inten II Lampung untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana di bandara agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar. 	
6.	Program Jamkestama	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal 28-30 Januari 2025 ke Yogyakarta. 2. Tanggal 31 Januari-2 Februari 2025 ke Solo, Jawa Tengah. 	<p>Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan.</p> <p>4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.</p>	
7.	Setjen DPR RI	Rapat BURT Senin, 3 Februari 2025. Agenda: Nota Penjelasan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2024.	Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp.5.985.563.646.977,- (<i>Lima triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah</i>) atau 98,53% dari pagu sebesar Rp.6.075.008.477.000,- (<i>Enam triliun tujuh puluh lima miliar delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>).	
8.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT Senin, 3 Februari 2025. Agenda: Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2024 Satker Dewan.	Realisasi anggaran Satker Dewan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp.4.303.546.003.209,- (<i>Empat triliun tiga ratus tiga miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ribu dua ratus sembilan rupiah</i>) atau 98,18% dari pagu sebesar Rp.4.383.428.630.000,- (<i>Empat triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah</i>).	
9.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT Senin, 3 Februari 2025.	Realisasi anggaran Satker Setjen sebesar Rp.1.682.017.643.768,- (<i>Satu triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tujuh belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah</i>) atau 99,43% dari pagu sebesar Rp.1.691.579.847.000,- (<i>Satu triliun enam</i>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Agenda: Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2024 Satker Setjen.	<i>ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).</i>	
10.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT Selasa, 4 Februari 2025. Agenda: Pembahasan Rancangan Awal Renstra DPR RI Tahun 2025-2029.		
11.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT Rabu, 5 Februari 2025. Agenda: Pembahasan Perubahan AKUPA DPR RI Tahun 2025.		
12.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT Rabu, 5 Februari 2025. Agenda: Pembahasan AKUPA DPR RI Tahun 2026.		
13.	Setjen DPR RI	Rapat BURT Kamis, 6 Februari 2025 Agenda: a. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2024 Satker Dewan. b. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan		

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		IV Tahun 2024 Satker Setjen. c. Laporan Panja Perubahan AKUPA DPR RI Tahun 2025. d. Laporan Panja AKUPA DPR RI Tahun 2026.		
14.	Bandara Internasional Yogyakarta	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka keprotokolan bandara Tanggal 7-9 Februari 2025.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri BURT DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan keprotokolan di Bandara Internasional Yogyakarta untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pelaksanaan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan. 2. Meninjau ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana di bandara agar pelaksanaan keprotokolan berjalan lancar. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	- Pimpinan DPR RI - Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI	Peresmian Ruangan BAKN DPR RI dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB.	<p>Acara peresmian ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibuka oleh Ketua BAKN DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., setelah sebelumnya didahului dengan pengguntingan pita oleh Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.</p> <p>Kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada kesempatan ini, Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif BAKN dalam mewujudkan ruangan ini. Hal ini mencerminkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan negara. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI, BAKN memiliki peran strategis dalam mengawal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 2) Ketua BAKN dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa ruangan baru BAKN diharapkan dapat menjadi sarana yang representatif bagi BAKN dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, termasuk dalam melakukan pembahasan hasil telaahan BAKN atas hasil pemeriksaan BPK serta berbagai agenda strategis lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan negara. 	
2.	Pimpinan BAKN	Rapat Pimpinan BAKN dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025 pukul 12.30 WIB.	Tertutup.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI	Rapat Intern BAKN dilaksanakan pada Selasa, 23 Januari 2025 pukul 11.00 WIB.	Tertutup.	
4.	Pimpinan BAKN	Rapat Pimpinan BAKN dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.	Tertutup.	
5.	Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI	Rapat Intern BAKN dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025 pukul 11.00 WIB.	Tertutup.	
6.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian - Kementerian BUMN - Kementerian Perdagangan 	Rapat Kerja dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2025 pukul 14.00 WIB.	Tertutup.	
7.	<ul style="list-style-type: none"> - PT Saraswati Anugerah Makmur Tbk - PT Petrokimia Gresik 	Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke <i>ke Provinsi Jawa Timur</i> dilaksanakan pada Jumat – Minggu, 7 – 9 Februari 2025.	<p>Pertemuan dengan PT <i>Saraswati Anugerah Makmur Tbk</i> dihadiri oleh Ir. Yahya Taufik Al Habsyi, Direktur Utama PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk, beserta jajaran.</p> <p>Kesimpulan hasil kunjungan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (“SAM” atau “Perseroan”) didirikan di Sidoarjo pada tahun 1998 dengan bisnis utama Perseroan yaitu memproduksi dan memasarkan produk pupuk NPK premium. - Perseroan fokus pada produk pupuk non subsidi dengan target utama perkebunan kelapa sawit. - Perseroan memiliki jaringan produksi dan penjualan yang luas: 7 pabrik NPK di 5 provinsi, 2 pabrik dolomit di 2 provinsi & 11 kantor pemasaran di seluruh Indonesia. 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Dalam merakit pupuk NPK berkualitas, Divisi Penelitian & Pengembangan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk bersama tim ahli, melakukan telaah, diskusi, riset bahan baku, trial produksi berulang-ulang, dan melakukan rangkaian penelitian seperti uji tanah, percobaan tanaman, baik dalam skala rumah kaca maupun skala yang lebih luas. - Mempertimbangkan permintaan pupuk untuk sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia yang masih sangat besar, Divisi Pupuk Saraswanti Group memproduksi beberapa merk pupuk untuk komoditi potensial. - Harga bahan baku pupuk dunia sangat fluktuatif menyebabkan harga pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk mengikuti harga bahan baku. <p>Pertemuan dengan PT <i>Petrokimia Gresik</i> dihadiri oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dwi Satriyo Annurogo, M.T., IPU, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik beserta jajaran; - Direktur dan <i>Senior Vice President</i> PT Petrokimia Gresik. <p>Kesimpulan hasil kunjungan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membahas <i>Highlight</i> Keuangan PT Petrokimia Gresik yang meliputi Likuiditas, Profitabilitas, dan <i>Operating Expense</i>. - Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan kepatuhan atas perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur. 2) Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan, beban operasional, dan investasi tahun 2021 dan 2022 pada PT Pupuk 	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik (PG) dan instansi terkait lainnya. 3) Pemeriksaan kepatuhan atas perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2020 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		<p>Rapat Pimpinan BAM dilaksanakan Rabu, 22 Januari 2025, pukul 13.00 – 16.00 WIB dengan agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengaduan/aspirasi masyarakat ▪ Anggaran BAM Masa Sidang II ▪ Hari Aspirasi ▪ Acara Festival Aspirasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI menyepakati Hari Rabu sebagai Hari Aspirasi yang diagendakan untuk menerima aspirasi masyarakat; 2. BAM DPR RI akan mengadaptasi Festival Aspirasi yang telah diselenggarakan oleh <i>Citizen OS</i> sebagai kegiatan tahunan BAM DPR RI untuk menjangkau aspirasi masyarakat; 3. BAM DPR RI mendukung langkah yang telah dilakukan Komisi IV dan jika diperlukan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan pemagaran laut; 4. BAM DPR RI akan melakukan tiga kali kunjungan kerja terkait implementasi kebijakan di masyarakat, serap aspirasi dan sosialisasi BAM DPR RI. 	
2.		<p>Rapat Intern BAM dilaksanakan Rabu, 22 Januari 2025, pukul 13.00 – 16.00 WIB dengan agenda Kegiatan BAM dalam MS II dan lain-lain.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Tata Tertib DPR RI terkait BAM DPR RI. Dalam rapat, dilakukan pembahasan mendalam mengenai tata tertib DPR RI yang berkaitan dengan fungsi dan peran BAM DPR RI. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan BAM DPR RI berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2. Pimpinan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para tenaga ahli yang telah bergabung dalam BAM DPR RI. Peran tenaga ahli ini diharapkan dapat memperkuat kinerja BAM dalam menjalankan tugasnya. 3. Penyusunan SOP terkait Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI diperlukan terkait fungsi dan mekanisme kerja BAM DPR RI. SOP ini akan menjadi panduan bagi seluruh pihak yang terlibat. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Penentuan Hari Aspirasi. Hari Rabu ditetapkan menjadi Hari Aspirasi. Namun, BAM akan tetap menerima aspirasi masyarakat pada hari lain, khususnya jika ada demonstrasi atau kegiatan masyarakat lainnya yang memerlukan perhatian segera.</p> <p>5. Kegiatan kerja BAM Masa Sidang II Tahun 2024-2025. Agenda kerja BAM DPR RI untuk Masa Sidang II Tahun 2024-2025 harus segera dirumuskan. Fokus utama adalah pada penyerapan aspirasi masyarakat dan penyampaian hasil kepada pihak terkait.</p> <p>6. Para Tenaga Ahli BAM DPR RI diberikan tanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mencermati aspirasi masyarakat yang sudah diterima. Analisis tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. b. melakukan review media secara rutin untuk mendapatkan masukan dan isu-isu terkini yang relevan dengan aspirasi masyarakat. Hal ini akan dijadikan sebagai salah satu informasi untuk menyusun kebijakan. <p>7. Kunjungan Spesifik atau Perjalanan Dinas akan dilakukan BAM DPR RI dengan mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyerapan Aspirasi: BAM terus berkomitmen untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, termasuk kunjungan kerja, pertemuan langsung, maupun penggunaan teknologi informasi b. Sosialisasi BAM: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang BAM, akan dilakukan sosialisasi melalui kerja sama dengan media massa, seperti Radio Republik Indonesia (RRI) 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Pemantauan Kebijakan Pemerintah: BAM memastikan kebijakan pemerintah telah terlaksana secara efektif di masyarakat. Contohnya termasuk program makan siang gratis, penanganan kasus ginjal pada anak, dan layanan kesehatan. Aspirasi terkait pelaksanaan kebijakan ini akan ditelaah dan disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang</p> <p>8. Kajian Aspirasi yang telah masuk akan ditelaah untuk menentukan mana yang memerlukan respon segera.</p> <p>9. Rapat dengan analis legislatif dan analis pengaduan masyarakat perlu segera dilakukan untuk membahas aspirasi masyarakat secara lebih mendalam</p> <p>10. Disepakati bahwa rapat pimpinan BAM DPR RI akan dilaksanakan pada Kamis, 23 Januari 2025 pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan rapat internal BAM pukul 14.00 WIB.</p>	
3.	LSM Aliansi Keluarga Besar Blang Lancang-Rancong (LSM AKBAR) Kota Lhokseumawe, Aceh	RDPU dilaksanakan pada Kamis, 3 Februari 2025 pukul 10.00 WIB – selesai dengan agenda Penyelesaian <i>Resetting</i> Warga Eks Blang Lancang - Rancong, Lhokseumawe, Aceh.	<p>1. LSM AKBAR menyampaikan alternatif penyelesaian masalah <i>resettlement</i> bagi 542 KK warga eks Blang Lancang dan Rancong yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset PT Pertamina seluas 121,9 ha yang berada di Ujung Pacu untuk dikembalikan penguasaannya kepada negara yang selanjutnya digunakan sebagai <i>resettlement</i> warga eks Blang Lancang dan Rancong. PT Pertamina segera melakukan identifikasi dan inventarisasi penguasaan tanah oleh masyarakat di lokasi <i>resettlement</i> seluas 121,9 ha tersebut. 2. Terhadap tanah barang milik negara yang dimanfaatkan oleh PT Pertamina di KEK Arun, dapat dilakukan pembelian oleh PT Pertamina dan hasil pembelian tersebut digunakan untuk pemberian kompensasi yang layak dan adil kepada masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan LSM AKBAR, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI turut prihatin atas persoalan yang menimpa masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong. 2. Persoalan <i>resettlement</i> yang belum selesai selama 50 tahun ini mendesak untuk diselesaikan karena jika tidak diselesaikan akan terus menjadi permasalahan antargenerasi. 3. Komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait perlu dilakukan terus-menerus sebagai upaya untuk pemenuhan hak masyarakat eks Blang Lancang- Rancong, terutama PT Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas relokasi pada 1974. 4. Komitmen dari PT Pertamina Persero dan Sekretariat Negara RI dapat menjadi harapan masyarakat eks Blang Lancang dan Rancong. 5. BAM DPR RI akan menyampaikan aspirasi yang telah disampaikan, untuk diteruskan kepada Pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait guna mendorong penyelesaian permasalahan dimaksud. 6. BAM DPR RI akan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut oleh Alat Kelengkapan Dewan atas aspirasi yang telah disampaikan. 	
4.	Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia	RDPU dilaksanakan pada Kami, 3 Februari 2025 pukul 11.30-14.30 WIB dengan agenda Aspirasi dari para Tenaga Honorer R2 dan R3 Indonesia menjadi PPPK Penuh Waktu dan Menolak Menjadi PPPK Paruh Waktu.	<p>1. Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia yang dipimpin oleh Faisol Mahardika menyampaikan tuntutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu dan menuntut agar para honorer R2 dan R3 diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu dan menolak menjadi PPPK Paruh Waktu; 2. Meminta kepastian terealisasinya tuntutan para honorer R2 dan R3 untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu; 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Meminta Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan seluruh honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Penuh Waktu; 4. Meminta Pemerintah untuk optimalisasi formasi dan anggaran kepada daerah guna mengangkat honorer status R2 dan R3 menjadi PPPK Penuh Waktu. 2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan DPP Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI prihatin atas permasalahan yang dialami oleh honorer yang telah banyak berkontribusi bagi bangsa. 2. BAM DPR RI mengapresiasi atas aspirasi yang telah disampaikan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia dan mendorong Aliansi untuk terus memperjuangkan haknya. 3. BAM DPR RI memahami implikasi Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu yang tidak sesuai dengan harapan para honorer. 4. BAM DPR RI memandang masa kerja perlu menjadi pertimbangan dalam penyelesaian honorer dan perlunya perbaikan sistem rekrutmen PPPK serta jaminan kesejahteraan bagi mereka. 5. BAM DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi DPP Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia dengan menyampaikan aspirasi ini kepada Pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan (AKD) terkait, khususnya Komisi II DPR RI untuk mengawal penyelesaian nasib tenaga honorer. 	
5.	Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) Israel di Indonesia	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 pukul 10.00 WIB – selesai dengan agenda BDS Indonesia terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi Israel di Indonesia (BDS Indonesia) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Boikot dilakukan terhadap produk-produk Israel yang memenuhi kriteria <i>targeted</i> atau terpilih. Kriteria boikot yang diperjuangkan 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>pelanggaran dan kejahatan Israel terhadap Palestina.</p>	<p>BDS Indonesia adalah tingkat keterlibatan, dapat diterima lintas-golongan, daya tarik media, dan potensi keberhasilan yang tinggi. Ruang lingkup boikot meliputi boikot ekonomi, boikot budaya, dan boikot olahraga. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk yang ditarget dan produk yang tidak ditarget sebagai produk yang layak diboikot.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terkait dengan sanksi terhadap Israel, BDS Indonesia memperjuangkan dan mendukung RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi yang saat ini telah masuk dalam daftar <i>longlist</i> Program Legislasi Nasional di Baleg DPR RI. Keberadaan Undang-Undang tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi ini dipandang penting sebagai payung hukum dan perlindungan agar masyarakat tidak ragu untuk memboikot. BDS Indonesia mengusulkan agar kandungan RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi bersifat moderat, tidak terlalu ketat, sehingga mudah diimplementasikan. 3. BDS Indonesia juga meminta DPR untuk memperjuangkan pengusiran Israel dari kancah internasional, dengan menghentikan keanggotaan Israel di PBB. Pengusiran dapat berbentuk <i>suspension, expulsion, ban</i>, dan sejenisnya. Dasar pengusiran ini adalah Pasal 5 dan 6 UN Charter, yaitu negara yang secara persisten melakukan pelanggaran, dapat dikeluarkan secara langsung dari keanggotaan PBB. Terkait isolasi Israel dari lembaga internasional, BDS Indonesia telah menggalang petisi online dan sudah mendapatkan 30.000 tanda tangan. 4. BDS Indonesia terus berusaha mencegah terjadinya normalisasi hubungan dengan Israel. BDS Indonesia juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengucilkan Israel. Dalam konteks ini 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>BDS Indonesia juga sudah menyampaikan kepada BKSAP DPR RI agar tidak menyertakan Israel dalam forum IPU.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. BDS Indonesia menemukan data adanya peningkatan transaksi perdagangan Indonesia-Israel. BDS mengusulkan agar hubungan ekonomi tersebut segera dievaluasi sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap Israel. 6. BDS Indonesia juga mendapatkan laporan beberapa kampus perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan pembatasan dan mempersulit aksi pembelaan terhadap Palestina. <p>2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan BDS Indonesia, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI menyampaikan apresiasi kepada BDS Indonesia yang secara konsisten melakukan perjuangan untuk menghapus penjajahan terhadap Palestina. 2. BAM DPR RI meminta kepada BDS Indonesia untuk fokus terhadap kebijakan yang diarahkan untuk mengubah kebijakan Pemerintah Israel terhadap Bangsa Palestina, mengingat mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB bukan perjuangan yang ringan, karena menyangkut politik global yang kompleks. 3. BAM DPR RI mendorong kesadaran dan literasi bagi generasi muda agar tak lelah berjuang untuk menghapuskan penjajahan di dunia, khususnya di Palestina dapat terus ditingkatkan. 4. BAM DPR RI berpendapat, RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi yang diusulkan harus selalu relevan dengan berbagai perubahan politik global dan dinamika konflik Israel-Palestina sehingga substansi RUU tersebut dapat bersifat lebih umum untuk 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menghindarkan masyarakat Indonesia dari berbagai bentuk ketidakadilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. BAM DPR RI merekomendasikan kepada Komisi I DPR RI untuk mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menghentikan penjajahan Israel dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. 6. BAM DPR RI merekomendasikan kepada Komisi VI DPR RI untuk mendesak Kementerian Perdagangan RI agar mengontrol dan mengevaluasi transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Israel. 7. BAM DPR RI merekomendasikan kepada Komisi X DPR RI untuk mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI agar memasukkan pengetahuan tentang geopolitik dan literasi tentang konflik Israel-Palestina dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI untuk menegur perguruan tinggi yang membatasi dan mempersulit aksi anti-Israel pembelaan terhadap Palestina. 8. BAM DPR RI meminta BDS Indonesia untuk menyampaikan data dan hasil kajian yang lebih komprehensif untuk disampaikan pada AKD terkait. 	
6.	Indonesia Zakat Watch (IZW)	RDPU dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di R.Rapat BAM pukul 13.30 – selesai dengan agenda Evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia Zakat Watch yang dipimpin oleh Barman Wahidatan menyampaikan aspirasi, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam rangka mendorong ekosistem tata kelola zakat di Indonesia yang lebih baik. 2. Evaluasi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak norma hukum yang sudah tidak relevan, sehingga perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan saat ini. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan BAZNAS sebagai lembaga yang <i>super power</i> karena posisinya sebagai koordinator, regulator, operator, dan auditor, sehingga menyebabkan terjadinya <i>conflict of interest</i>. 3. Terkait dengan pemberian rekomendasi perizinan operasional pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh BAZNAS, akan memungkinkan BAZNAS memiliki pandangan subjektif terkait dengan penerbitan rekomendasi izin operasional tersebut. 4. Posisi BAZNAS yang demikian, berakibat pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia menjadi rendah karena tahapan perizinan yang cukup panjang, termasuk dalam hal lembaga zakat berbasis korporat yang kemudian dipaksa untuk menjadi Unit Pengelola Zakat (UPZ) BAZNAS. <p>3. IZW mengusulkan beberapa perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Pengelolaan Zakat harus memberikan payung hukum bagi aktivitas pengelolaan zakat tidak hanya bagi pengelola zakat berbadan hukum, tetapi juga pengelola zakat yang tidak berbadan hukum (amil tradisional), seperti kiai, masjid, dan lainnya. Hal ini dalam rangka meminimalisir terjadinya potensi kriminalisasi bagi pengelola zakat tidak berbadan hukum (amil tradisional) yang saat ini masih menjalankan aktivitas pengelolaan zakat di beberapa daerah di Indonesia. 2. Perlunya menambahkan aturan (pasal baru dalam revisi UU) terkait standar kompetensi Amil sesuai dengan SKKNI 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Pengelolaan Zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perlunya mengatur tentang pemisahan peran regulator, operator, dan pengawas yang saat ini menjadi kewenangan BAZNAS dengan membentuk Komisi Zakat Indonesia sebagai pengawas BAZNAS dan LAZ. 4. Perlunya memasukkan aturan terkait akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum positif dan syariah dalam norma hukum baru UU Pengelolaan Zakat. 5. Perlunya mengakomodir hukum fiqh kontemporer untuk merespon kondisi yang terus berkembang. 6. Perlunya memastikan perlindungan data mustahik dan data muzaki dalam UU Pengelolaan Zakat. 7. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, perlu ada opsi: <ol style="list-style-type: none"> 1) BAZNAS bisa berfungsi sebagai regulator, kontroler, dan auditor, sementara peran operator sepenuhnya dilakukan oleh LAZ, atau; 2) BAZNAS dan LAZ sebagai operator, sedangkan fungsi regulator diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama. 2. Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan IZW, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. BAM DPR RI mengapresiasi masukan dari IZW terhadap evaluasi dan usulan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih baik. 	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ol style="list-style-type: none"> 2. BAM DPR RI mendorong pengelolaan zakat tidak hanya pada masalah-masalah karitatif, tapi pada masalah-masalah advokasi, isu lingkungan, hingga isu perempuan. 3. BAM DPR RI memahami bahwa potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp327 triliun (berdasarkan kajian PUSKAS BAZNAS RI) merupakan salah satu potensi yang sangat signifikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, seperti pengentasan masalah kemiskinan, pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lainnya di luar ketersediaan APBN yang terbatas. 4. BAM DPR RI berpandangan bahwa negara harus hadir dalam hal pemberian izin operasional LAZ. 5. BAM DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh IZW terkait evaluasi dan usulan perubahan/revisi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kepada Komisi VIII dan Badan Legislasi DPR RI. 	
